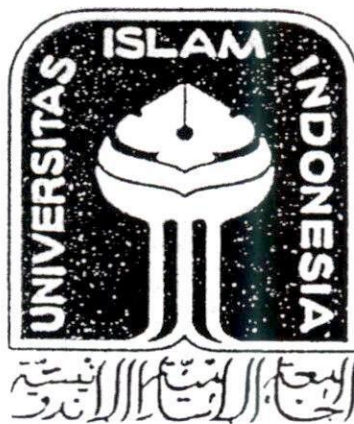


**PENDIDIKAN PARTISIPATIF PONDOK PESANTREN DAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP KEBERSIHAN
LINGKUNGAN DI KOTA BALIKPAPAN**
(Studi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004
tentang Pengelolaan Persampahan)



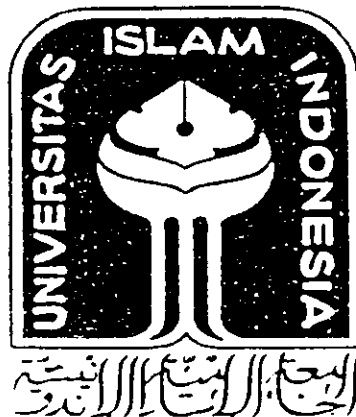
Oleh:
Moh. Slamet Junaidi
NIM.: 07913109

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2009

**PENDIDIKAN PARTISIPATIF PONDOK PESANTREN DAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP KEBERSIHAN
LINGKUNGAN DI KOTA BALIKPAPAN**
(Studi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004
tentang Pengelolaan Persampahan)



Oleh:
Moh. Slamet Junaidi
NIM.: 07913109

Pembimbing:
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2009



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 610/PS-MSI/Peng./X/2009

TESIS berjudul : **PENDIDIKAN PARTISIPATIF MASYARAKAT
TERHADAP KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KOTA
BALIKPAPAN (Studi Kasus Dukungan Lembaga Pendidikan
Islam dan Ormas Islam terhadap Pelaksanaan Perda Nomor
04 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan)**

Ditulis oleh : Moh. Slamet Junaidi

N. I. M. : 07913109

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Pendidikan Islam

Yogyakarta, 23 Oktober 2009

Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAQISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

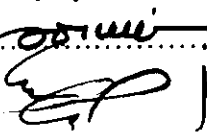
TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Moh. Slamet Junaidi
Tempat/tgl.lahir : Blitar, 17 April 1964
N. I. M. : 07913109
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **PENDIDIKAN PARTISIPATIF MASYARAKAT TERHADAP
KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KOTA BALIKPAPAN (Studi
Kasus Dukungan Lembaga Pendidikan Islam dan Ormas Islam
terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 04 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Persampahan)**

Ketua : Drs. Yusdani, M.Ag.

()

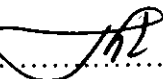
Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA

()

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

()

Penguji : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

()

Penguji : Drs. H. Hujair AH Sanaky, MSI

()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 2009

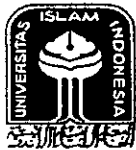
Pukul : 09.00–10.00 WIB

Hasil / Nilai : **89,00 / A**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 767/PS-MSI/ND/X/2009

TESIS berjudul : **PENDIDIKAN PARTISIPATIF MASYARAKAT
TERHADAP KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KOTA
BALIKPAPAN (Studi Kasus Dukungan Lembaga Pendidikan
Islam dan Ormas Islam terhadap Pelaksanaan Perda Nomor
04 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan)**

Ditulis oleh : Moh. Slamet Junaidi

NIM : 07913109

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 6 Oktober 2009

Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : **PENDIDIKAN PARTISIPATIF MASYARAKAT TERHADAP
KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KOTA BALIKPAPAN (Studi
Kasus Dukungan Lembaga Pendidikan Islam dan Ormas Islam
terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 04 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Persampahan)**

Ditulis oleh : Moh. Slamet Junaidi

N. I. M. : 07913109

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 29 September 2009
Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MOTTO

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

Kebersihan Adalah Sebagian Daripada Iman

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fīr</i>
------------	---------	---------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	a
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----	<i>damamah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i> تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>damamah + wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i> بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i> قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>zawi al-furūd</i> <i>ahl as-Sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

PENDIDIKAN PARTISIPATIF PONDOK PESANTREN DAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP
KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KOTA BALIKPAPAN
(Studi terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004
tentang Pengelolaan Persampahan)

Oleh
Moh Slamet Junaidi
NIM: 07913109

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara faktual 1) pola partisipasi dan peran Ormas Islam dalam penanganan sampah di Kota Balikpapan; 2) pola partisipasi dan peran pondok pesantren yang ada di kota Balikpapan dalam penanganan sampah sesuai Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Balikpapan

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan objeknya adalah pengelolaan kebersihan Kota Balikpapan melalui pendidikan partisipatif masyarakat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pondok pesantren yang ada di Kota Balikpapan yang berjumlah 26 pondok pesantren dan Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan. Dari populasi tersebut, sampel diambil secara acak (*random sampling*). Teknik pengumpulan data melalui angket dan wawancara guna mendapatkan gambaran yang mendalam tentang pengelolaan kebersihan di pondok pesantren. Teknik analisis data dalam penelitian adalah dengan pendekatan analisis isi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pondok pesantren sudah menerapkan Perda 10 nomor Tahun 2004 tentang kebersihan dengan kerja bakti secara rutin untuk membersihkan lingkungan pondok. Hal ini terlihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 100% responden (pondok pesantren) sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan mengadakan gotong royong (kerja bakti) secara rutin. Pondok Pesantren tidak melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan kebersihan lingkungan, hal ini terlihat dari hasil penelitian bahwa 92% responden tidak melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan kebersihan lingkungan pondok. Pondok pesantren sudah menyediakan pembuangan sampah sementara, Kesadaran akan pengelolaan lingkungan hidup sudah tinggi dengan mengalokasikan anggaran khusus, hal ini terlihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 75% pondok pesantren yang menjadi responden memiliki anggaran untuk pengelolaan Lingkungan Hidup; (2) Belum adanya peran Majelis Ulama Indonesia kota Balikpapan dalam mensosialisasikan Perda nomor 10 Tahun 2004 tentang kebersihan kota, karena memang belum diminta untuk mensosialisasikan Perda nomor 10 tersebut oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

Kata Kunci: Pendidikan Partisipatif, Pondok Pesantren, Majelis Ulama Indonesia

***The Participatory Education of Society towards
the Clean Environment in Balikpapan City***
***(A Case Study on the Support of Islamic Organization and Islamic Institutions
towards the Implementation of Local Regulation No. 10 of 2004
Concerning the Management of Garbage)***

By
Moh. Slamet Junaidi
NIM: 07913109

ABSTRACT

The study was aimed at describing factually: 1) the pattern of participation and role of Islamic organization (read: MUI) concerning the garbage management in Balikpapan city; 2) the pattern of participation and role of Islamic institutions (read: Pondok Pesantren) concerning the management of the garbage pursuant to the Local Regulation (read: Perda) No. 10 of 2004 concerning the Management of Garbage in the city.

The study was a descriptive one, in which its object is the management of clean environment of Balikpapan city through participatory education of society. The population is Indonesian Council of Ulama Balikpapan and all Islamic boarding schools existing in the city, i.e. 26 schools. From the population, sample was taken by random sampling technique. The techniques for data collection are questionnaire and interview. The technique for data analysis was content analysis.

The findings show that 1) Islamic institutions such as pondok pesantren have implemented the Perda through routinely cleaning the environment around their pondok. The finding indicated that 100% respondents are aware of the importance of clean environment. 92% respondents from Pondok Pesantren do not involve the third party to clean their environment, for they have prepared temporary place for garbage. 75% respondents of Pondok pesantren have budget concerning the management of clean environment. 2) there is no significant role and participation of the Indonesian Council of Ulama of the city to promote and socialize the Perda, since local government of Balikpapan does not ask the Council to do it.

Key words: Participatory Education, Pondok Pesantren, Indonesian Council of Ulama

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, atas rahmat dari Allah SWT, dengan segala petunjuk dan karunia-Nya yang dianugerahkan kepada Penulis, sehingga Tesis ini dapat diselesaikan. Dengan ketekunan dan keterbatasan pengetahuan, penulis berupaya menyelesaikan walaupun di sisi lain hasilnya masih jauh dari harapan.

Tesis ini tidak akan tersusun dengan benar tanpa bantuan dari semua pihak yang telah memberikan bantuan dan sumbangsih pemikirannya. Untuk hal tersebut Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor UII.
2. Bapak Drs. H. Fajar Hidayanto, MM., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (FIAI UII).
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Program Pascasarjana FIAI UII dan selaku Dosen Pembimbing Tesis. Penulis mengucapkan Banyak terima kasih atas perhatian, kesediaan, kesabaran, dan bimbingannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Drs. H. Asmuni Mth., MA. Selaku Sekretaris Pascasarjana FIAI UII.
5. Segenap Karyawan dan Pengelola Program Pascasarjana FIAI UII Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Guru Besar Program Pascasarjana FIAI UII.

7. Bapak Walikota Balikpapan, Kepala DPKP, Kepala Kantor Departemen Agama Kota Balikpapan, Ketua MUI Kota Balikpapan dan Pimpinan Pondok Pesantren As-Syifa, Syaicono Cholil dan Al-Mustakim, Arsyad Al Banjari dll, yang telah membantu Penulis untuk melakukan kegiatan penelitian.
8. Istri tercinta Netti Herawati, SE, dan anak-anakku tersayang, yang telah memberikan dorongan dan memberikan waktu untuk menyelesaikan Tesis ini dengan penuh semangat.

Akhirnya Penulis berdo'a semoga Tesis ini bermanfaat bagi diri Penulis dan para pembaca. *Amīn Yā Robbal 'Ālamīn.*



Balikpapan, 28 September 2009

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA
Slamet Junaidi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tela'ah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	14
F. Langkah-langkah Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
 BAB II. DISKRIPSI UMUM OBYEK PENELITIAN	 21
A. Kota Balikpapan	21
B. Ormas Islam.....	58
1. Pondok Pesantren di Kota Balikpapan	58

2. Majelis Ulama Indonesia Balikpapan.....	67
C. Peraturan Pemerintah Daerah tentang Kebersihan	68
 BAB III. PENDIDIKAN PARTISIPATIF DAN PEMBANGUNAN	
LINGKUNGAN	84
A. Pendidikan Partisipatif.....	84
B. Kesadaran Masyarakat akan Kebersihan	87
C. Pembangunan Masyarakat Madani.....	104
 BAB IV. DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN HASIL	
PENELITIAN	122
A. Deskripsi Data Penelitian.....	122
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	126
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	132
B. Saran	133
 DAFTAR PUSTAKA	134
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2006 s/d 2008.....	29
Tabel 2.	Penduduk Kota Balikpapan Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 Tahun 2006 s/d 2008	30
Tabel 3.	Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2007.....	31
Tabel 4.	Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Kota Balikpapan Tahun 2006.....	32
Tabel 5.	Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kota Balikpapan Tahun 2006.....	33
Tabel 6.	Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Balikpapan Tahun 2006	34
Tabel 7.	Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2005	35
Tabel 8.	Perkembangan PDRB Tahun 2000-2006	36
Tabel 9.	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral di Kota Balikpapan Tahun 2000-2005	38
Tabel 10.	Kontribusi Sektoral PDRB Kota Balikpapan Berdasarkan PDRB Total dengan Migas Tahun 2005 (Atas Dasar Harga Berlaku)..	39
Tabel 11.	Struktur Ekonomi Menurut Klasifikasi Sektor Primer, Sekunder dan Tersier (dengan Migas) di Kota Balikpapan Tahun 2001-2005 (Atas Dasar Harga Berlaku).....	41
Tabel 12.	Struktur Ekonomi Menurut Klasifikasi Sektor Primer, Sekunder dan Tersier di Kota Balikpapan Tahun 2001-2005 (Atas Dasar Harga Berlaku).....	42
Tabel 13.	Perkembangan Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Kota Balikpapan Tahun 2006.....	43
Tabel 14.	Persentase Perbandingan Pertumbuhan PDRB,Pendapatan Perkapita dan Inflasi Kota Balikpapan Tahun 2001-2006	44

Tabel 15. Perkembangan Jumlah Produksi, Pelanggan, Pengguna serta Prosentase Penggunaan terhadap Produksi Air Minum di Kota Balikpapan Tahun 2001-2006	48
Tabel 16. Jumlah Penggunaan Air Minum Ditinjau Dari Golongan dan Penerimaan Uang Jasa PDAM Kota Balikpapan Tahun 2000-2005	49
Tabel 17. Sambungan/Pelanggan Air Bersih PDAM Kota Balikpapan Per Kecamatan Tahun 2004-2005.....	50
Tabel 18. Kondisi Fisik Jalan di Kota Balikpapan Tahun 2005	51
Tabel 19. Kondisi Fisik Jembatan di Kota Balikpapan Tahun 2005	52
Tabel 20. Panjang Kondisi Jalan, Jembatan, Irigasi di Kota Balikpapan Tahun 2005	52
Tabel 21. Panjang Drainase Kota Balikpapan Tahun 2006.....	54
Tabel 22. Timbulan Sampah dan Jumlah Sampah Yang Diangkut Setiap Harinya Tahun 2005.....	56
Tabel 23. Jumlah Sarana/Armada Sampah yang terdapat di Kota Balikpapan.....	58
Tabel 24. Rekapitulasi Data Pondok Pesantren Tahun 2009.....	64
Tabel 25. Hasil Penelitian Angket terhadap Pondok Pesantren	122
Tabel 26. Hasil Penelitian terhadap MUI Balikpapan	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbunan sampah: jenis, keberagaman dan karakteristiknya. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Di lain pihak pengelolaan dan pengurusan sampah masih sering terselesaikan dengan baik. Permasalahan ini akan mengakibatkan masalah besar kalau berlarut-larut, karena penumpukan sampah atau membuangnya sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air tanah. Demikian juga pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara, pembuangan sampah ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air, tersumbatnya saluran air dan banjir.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Berdasarkan sifat fisik dan kimianya sampah dapat digolongkan menjadi: (1) sampah ada yang mudah membusuk terdiri atas sampah organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun dan lain-lain; (2) sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan dan lain-lain; (3) sampah yang berupa debu/abu; dan (4) sampah yang berbahaya (B3) bagi kesehatan, seperti sampah berasal dari industri dan rumah sakit yang mengandung zat-zat kimia dan agen penyakit yang berbahaya. Untuk mewujudkan kota bersih dan hijau, pemerintah telah mencanangkan berbagai program yang pada dasarnya bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah. Haslinda Yasti Agustin¹ mengungkapkan bahwa banyak negara besar melakukan *incineration* atau pembakaran, yang menjadi alternatif dalam pembuangan sampah, namun masalah berikutnya adalah biaya proses ini lebih mahal dibandingkan dengan sistem pembuangan akhir (*sanitary landfill*). Apabila sampah ini digunakan untuk pertanian dalam jumlah yang besar, maka akan menimbulkan masalah karena mengandung logam berat.

Berkaitan dengan pengelolaan sampah, Islam sebagai agama yang mengusung visi *rahmatan lil' ālamīn* sangat berkepentingan dengan usaha dan upaya pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan. Di dalam Al-Qur'an, Allah

¹ Haslinda Yasti Agustin. *Masalah Sampah di Indonesia dan Solusinya*. Diakses dari <http://gbioscience05.wordpress.com/2008/04/22/masalah-sampah-di-indonesia-dan-solusinya/> tanggal 21 September 2009.

SWT berfirman: *“Wa mā arsalnāka illā rahmatan lil’ ālamīn”*, yang bermakna *“Tidaklah Kami turunkan engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta”*². Ayat tersebut menjelaskan maksud Allah SWT mengutus rasul-Nya, Muhammad SAW, untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Rahmat pada umumnya mengandung pengertian kasih sayang, keadilan, dan kesejahteraan. Alam semesta dapat didefinisikan sebagai jagat raya yang di dalamnya termasuk manusia, tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya, serta makhluk tidak hidup. *Rahmatan lil’ ālamīn* bukanlah sekedar motto Islam, tapi merupakan tujuan dari Islam itu sendiri. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka sudah sewajarnya apabila Islam menjadi pelopor bagi pengelolaan alam dan lingkungan sebagai manifestasi dari rasa kasih bagi alam semesta tersebut. Selain melarang membuat kerusakan di muka bumi, Islam juga mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan yang bersih, karena kebersihan merupakan bagian hidup masyarakat Islam seperti diutarakan oleh nabi Muhammad SAW dengan hadisnya yang artinya: *“Kebersihan merupakan bagian dari iman”*.

Nabi Muhammad SAW juga melarang manusia untuk membuang air seni ke dalam sumber mata air, jalanan, di tempat teduh, dan di dalam liang (tempat hidup) binatang. Larangan tersebut dapat dimanifestasikan lebih lanjut sebagai larangan untuk membuang sampah atau produk-produk berbahaya ke dalam lingkungan yang kemungkinan besar akan merusak atau menurunkan mutu lingkungan tersebut. Islam mengajak manusia untuk secara aktif menjaga lingkungan tersebut, misalnya dengan

²QS Al-Anbiya: 107.

membuang sampah pada tempatnya. Hal ini sesuai dengan filsafah Islam yang umumnya bersifat lebih suka mencegah (*preventive*) perbuatan atau kejadian yang buruk ketimbang mengobati (*curative*) kejadian atau perbuatan buruk yang telah terjadi. Namun, Islam juga tidak berpangku tangan apabila telah terjadi suatu kejadian buruk atau kejahatan seperti misalnya tertuang dalam hukum agama (*syar'i*) yang mengatur hukuman bagi pelanggar aturan.

Bidang-bidang yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan *rahmatan lil' ālamīn* antara lain: pertama, *Pendidikan lingkungan*. Pendidikan lingkungan yang diajarkan secara Islami merupakan sarana penting bagi muslim untuk mengenal dan menyadari lingkungan hidup mereka secara baik dan benar sehingga mampu berperan secara sadar dan aktif dalam pengelolaan dan pembinaan lingkungan. Sebagai mayoritas penduduk Indonesia, muslim mempunyai kewajiban dan peran yang sangat besar dalam pengelolaan lingkungan tersebut. Dibutuhkan pengetahuan dan kesadaran yang mendalam bahwa Islam sangat memperhatikan lingkungan dan kesehatan. Hal ini membutuhkan peran pendidik, ulama, dan tokoh masyarakat untuk menanamkan pengetahuan dan kesadaran tersebut kepada masyarakat. Pada masyarakat pedesaan yang sebagian besar bersifat *primordial*, peran ulama dalam mensukseskan program pengelolaan lingkungan sangatlah besar. Masyarakat pedesaan umumnya pasif dan mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh ulama atau pemimpin mereka. Untuk itu sudah sewajarnya apabila ulama, pemimpin, ataupun calon ulama dan pemimpin masyarakat membekali diri dengan pengetahuan yang

memadai mengenai pengelolaan lingkungan dan kesehatan. Pada masyarakat perkotaan yang umumnya lebih individualistis, intelektual muslim diharapkan menjadi contoh yang baik dalam menjaga dan mengelola lingkungan, karena dengan pengetahuan yang dimilikinya seharusnya dia mampu menyelaraskan dan memadukan perintah agama dengan perannya sebagai bagian dari penebar kasih bagi semesta alam.

Bidang kedua yang perlu dikembangkan adalah *Media massa Islam*. Peran media massa Islam tidaklah kurang penting dari pendidikan bahkan merupakan partner yang cukup relevan untuk menunjang pendidikan lingkungan tersebut. Media massa Islami harus diisi pula dengan pendidikan lingkungan, terutama untuk anak-anak dan generasi muda sehingga mereka menyadari hubungan agama dengan lingkungan dan arti penting hubungan tersebut demi kesejahteraan dan kesehatan manusia dan lingkungan. Program interaktif mengenai lingkungan perlu diciptakan guna menambah wawasan dan juga ketrampilan anak-anak dan generasi muda tersebut. Untuk kalangan dewasa, media massa perlu juga menyisipkan pendidikan mengenai bahaya yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan dan juga pengetahuan mengenai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang sesuai dengan nafas Islam.

Permasalahan sampah merupakan permasalahan yang sangat krusial dalam lingkungan. Apresiasi pemerintah dan masyarakat selalu dituntut untuk melakukan pengelolaan sampah sehingga pada gilirannya sampah dapat diolah secara mandiri

dan menjadi sumberdaya. Secara khusus, di Kota Balikpapan, permasalahan sampah mengemuka terkait dengan banyak hal: di kawasan Pandansari Balikpapan Barat terkait dengan pedagang kaki lima (PKL) di Pandansari yang sampai kini belum tuntas. Pasalnya setelah kegiatan berdagang, di lokasi tempat PKL ini akan terlihat sampah yang berserakan di mana-mana. Menurut Hairani sebagaimana dilansir Post Metro³ salah satu tujuan untuk penertiban para PKL di kawasan Pandansari adalah untuk menjaga kebersihan di kawasan tersebut, sebab para PKL banyak memakai kawasan jalan yang praktis merupakan fasilitas umum, sementara kawasan ini harus bersih dari kotoran dan sampah karena merupakan fasilitas umum yang menjadi titik pantau Adipura. Salah satu antisipasi oleh Pemerintah Kota Balikpapan Kalimantan Timur mengancam dengan hukuman penjara selama 5 bulan serta denda Rp 5 juta bagi pembuang sampah sembarangan. Ini merupakan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Sampah dan juga usaha meraih Piala Adipura pada tahun 2009.

Mencermati fenomena di atas maka sangat diperlukan partisipasi semua pihak dalam pengelolaan sampah yang baik dan tepat dalam upaya mewujudkan kota Balikpapan yang bersih dan hijau. Secara spesifik, kajian penelitian ini adalah Pendidikan Partisipatif Pondok Pesantren dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Balikpapan (Studi Kasus Dukungan Pondok Pesantren dan MUI terhadap

³ "PKL Belum Tuntas, Sampah Menjadi Masalah", *Metro Balikpapan.co.id*. diakses melalui <http://www.metrobalikpapan.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=24764>. Selasa, 20 Oktober 2009.

Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan).

B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini diarahkan untuk mengungkapkan mengungkap peran partisipatif pondok pesantren dan yang ada di kota Balikpapan dalam penanganan masalah sampah. Secara khusus, fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola partisipatif Pondok Pesantren di Kota Balikpapan dalam penanganan sampah berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan?
2. Bagaimana pola partisipatif MUI yang ada di Kota Balikpapan dalam penanganan sampah berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara faktual: 1) Pola partisipasi dan peran pondok pesantren dalam penanganan sampah di Kota Balikpapan; 2) pola partisipasi dan peran

MUI Kota Balikpapan dalam melakukan pendidikan kepada masyarakat mengenai penanganan sampah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk pengembangan pola-pola partisipasi Ormas Islam dan Pondok Pesantren dalam menangani sampah di Kota Balikpapan.

b. Manfaat praktis

Manfaat yang kedua adalah manfaat praktis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai:

- 1) Rekomendasi kebijakan berbasis data yang objektif kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Kebersihan Kota Balikpapan.
- 2) Informasi kepada masyarakat peran Pondok Pesantren dan MUI dalam penanganan sampah yang ada di Kota Balikpapan
- 3) Dasar pengembangan pola pendidikan partisipatif terhadap masyarakat kota Balikpapan dalam penanganan sampah kota.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa kajian tentang penanganan sampah yang dilakukan beberapa daerah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, antara lain:

1. Penelitian tentang peran Ulama di Kotamadya Banda Aceh dalam mewujudkan kebersihan kota⁴. Dalam Islam, ulama adalah pemimpin umat. Keberadaan mereka dibutuhkan oleh masyarakat Kotamadya Banda Aceh yang 95% penduduknya memeluk Agama Islam. Islam mempunyai konsep bersih yang luas untuk kepentingan ibadah dan kepentingan kebersihan lingkungan. Namun potensi seperti di atas belum banyak menunjang program kebersihan di Kotamadya Banda Aceh untuk mewujudkan kota bersih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masalah yang diteliti berkisar pada sejauh mana peranan ulama yang berfungsi sebagai motivator dalam sistem pengelolaan kebersihan, pengetahuannya dalam makna konteks tentang bersih yang mendukung pengetahuan bersih dari konsep Islam. Kemudian bentuk-bentuk aktivitasnya, kondisi kebersihan, dan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui tingkat peranan ulama dalam pelaksanaan program kebersihan, khususnya fungsi mereka sebagai motivator dengan menerapkan konsep agama tentang bersih. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kotamadya Banda Aceh belum mencerminkan kota bersih sesuai dengan standar yang dianut karena masih rendahnya partisipasi masyarakat. Hambatannya antara lain masih sulitnya merubah budaya membuang sampah di sembarang tempat yang dilatarbelakangi kurangnya pemahaman pengertian

⁴ Diakses melalui www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/abstrak.jsp?id=82653&lokasi=lokal tanggal 5 agustus 2009.

kebersihan lingkungan dan kurangnya motivasi. Pengertian dan penerapan konsep Islam tentang bersih masih terbatas pada kepentingan ibadah yang disebabkan antara lain oleh kurangnya keterlibatan ulama dalam memberikan motivasi tentang kebersihan lingkungan. Penelitian ini juga menyarankan agar dibuat sebuah sistem pengelolaan sampah yang terpadu meliputi Perda, pengadaan sarana, partisipasi masyarakat, dan motivasi ulama bersama unsur lain, dan secara kognitif Ulama Kotamadya Banda Aceh mempunyai pengetahuan konsep Islam tentang bersih, namun secara kuantitatif sebagian besar mereka belum banyak mengembangkan makna bersih secara kontekstual dalam memberikan motivasi. Atau: secara kualitatif pengembangan makna kontekstual sudah diterapkan, akan tetapi hanya oleh sebagian kecil ulama.

Kurangnya peranan ulama mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat bersama faktor lain juga dipengaruhi oleh faktor mendasar yaitu terbatasnya pengertian dan penerapan konsep Islam tentang bersih hanya pada keperluan ibadah ritual yang mereka terima dari pengajian dan bimbingan praktek ibadah. Mengingat ulama sebagai pemimpin umat yang memiliki kredibilitas tinggi di mata masyarakat Kotamadya Banda Aceh, maka peranan mereka diperlukan dalam sistem pengelolaan kebersihan. Ulama juga sebagai guru umat sehingga dituntut menguasai pengetahuan konsep Islam tentang bersih dalam arti luas.

2. I Wayan Suarna, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Udayana memuat satu model penanggulangan sampah di perkotaan dan pedesaan⁵.

Berdasarkan penelitiannya, terdapat beberapa pendekatan dan teknologi pengelolaan dan pengolahan sampah yang telah dilaksanakan antara lain adalah:

- a. Teknologi Komposting. Pengomposan adalah salah satu cara pengolahan sampah, merupakan proses dekomposisi dan stabilisasi bahan secara biologis dengan produk akhir yang cukup stabil untuk digunakan di lahan pertanian tanpa pengaruh yang merugikan (Haug, 1980). Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2008) menemukan bahwa pengomposan dengan menggunakan metode yang lebih modern (aerasi) mampu menghasilkan kompos yang memiliki butiran lebih halus, kandungan C, N, P, K lebih tinggi dan pH, C/N rasio, dan kandungan *Colform* yang lebih rendah dibandingkan dengan pengomposan secara konvensional.
- b. Teknologi Pembuatan Pupuk Kascing. Kascing adalah pupuk organik hasil proses dari ternak cacing yang dipelihara secara khusus. Bahan dasarnya adalah 80-90% kotoran ternak yang telah berumur 7-10 hari, dan 10-20% berupa limbah sayuran, sisa pakan ternak, dedaunan, dan lain-lain.

⁵ I Wayan Suarna. *Model Penanggulangan Masalah Sampah Perkotaan dan Pedesaan*. Diakses melalui <http://dies.unud.ac.id/wp-content/uploads/2008/09/09-makalah-sampah-untuk-dies-th-20081.doc>. tanggal 4 Agustus 2009.

- c. Pengolahan sampah menjadi listrik. Kota Denpasar, yang berorientasi pada teknologi dalam suatu Badan Bersama yaitu **SARBAGITA**. Teknologi yang direncanakan yaitu teknologi **GALFAD** (*gasifikasi landfill dan anaerobic digestion*). Pengelolaan sampah dengan pendekatan teknologi diharapkan penanganan sampah lebih cepat, efektif dan efisien serta dapat memberikan manfaat lain.
- d. Pengelolaan sampah mandiri. Pengolahan sampah mandiri adalah pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi sumber sampah seperti di rumah-rumah tangga. Masyarakat perdesaan yang umumnya memiliki ruang pekarangan lebih luas memiliki peluang yang cukup besar untuk melakukan pengolahan sampah secara mandiri. Model pengelolaan sampah mandiri akan memberikan manfaat lebih baik terhadap lingkungan serta dapat mengurangi beban TPA. Pemilahan sampah secara mandiri oleh masyarakat di Kota Denpasar masih tergolong rendah yakni baru mencapai 20% (Nitikesari, 2005).
- e. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat
- 1) Berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan sampah pemukiman kota yang ada di Desa Seminyak, Sanur Kauh dan Sanur Kaja, dan Desa Temesi Gianyar, yaitu: masalah pengadaan lahan untuk lokasi depo, terbatasnya peralatan teknologi dan perawatannya, terbatasnya dana untuk perekrutan tenaga kerja baru yang memadai, produksi kompos yang

masih rendah, sulit dan terbatasnya pemasaran kompos sehingga secara ekonomi pengelola cenderung mengalami defisit.

- 2) Model pengelolaan sampah pemukiman kota yang berbasis sosial kemasyarakatan dapat dilakukan secara adaptif dengan memperhatikan aspek karakteristik sosial dan budaya masyarakat, aspek ruang (lingkungan), volume, dan jenis sampah yang dihasilkan.
- 3) Pola pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebaiknya dilakukan secara sinergis (terpadu) dari berbagai elemen (Desa, pemerintah, LSM, pengusaha/swasta, sekolah, dan komponen lain yang terkait) dengan menjadikan komunitas lokal sebagai objek dan subjek pembangunan, khususnya dalam pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan bersih, aman, sehat, asri, dan lestari.
- 4) Undang-Undang tentang pengelolaan sampah telah menegaskan berbagai larangan seperti membuang sampah tidak pada tempat yang ditentukan dan disediakan, membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, serta melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA. Penutupan TPA dengan pembuangan terbuka harus dihentikan dalam waktu 5 tahun setelah berlakunya UU No. 18 Tahun 2008. Dalam upaya pengembangan model pengelolaan sampah perkotaan harus dapat melibatkan berbagai komponen pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, pengusaha, LSM, dan masyarakat.

E. Kerangka Teori

1. Kesadaran Masyarakat dalam Penanganan Sampah

Sistem penanganan sampah dan lingkungan tidak mampu berdiri sendiri menghadapi berbagai masalah kesehatan masyarakat perlu perilaku dan partisipasi masyarakat yang sadar bahwa masalah kesehatan merupakan tanggung jawab bersama diawali dari yang sederhana dan dapat dilakukan dimulai oleh setiap individu, keluarga, RT, RW, Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Propinsi dan akhirnya seluruh rakyat.

Sebagai contoh perilaku masyarakat didalam membuang sampah pada tempatnya merupakan upaya sederhana tetapi memberikan efek penghematan anggaran luar biasa bagi petugas kebersihan dan usaha pencegahan penyebaran penyakit, banjir dan masalah sosial lainnya. Namun sayangnya pemahaman terhadap sampah masih relatif terbatas, begitu banyak sungai menjadi korban terhadap buangan sampah yang menyebabkan banjir, penyakit termasuk hilangnya keindahan suatu daerah sungai. Pemikiran bahaya sampah terhadap kesehatan menghasilkan perlunya pengolahan sampah menjadi bahan yang produktif ternyata masih belum menjadi kebijakan daerah secara nasional pada umumnya ditumpuk menjadi gunung sampah yang akhirnya terjadi kasus runtuh menimpa rumah penduduk karena lokasi pemukiman yang berdekatan dengan tempat pembuangan sampah akhir (TPA).

2. Model Pendidikan Partisipatif Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Sebagai ilustrasi model sederhana sistem penanganan sampah dan lingkungan diuraikan berikut. Pada gambaran proses sistem *internal-horisontal* kesehatan masyarakat terlihat peran dan fungsi masing-masing pelayanan kesehatan sebagai tidak hanya rantai proses rujukan (*referral system*) tetapi merupakan proses tanggung jawab pembinaan bagi tingkat pelayanan dibawahnya sehingga tidak hanya tanggung jawab dinas kesehatan didalam melakukan pembinaan yang lebih banyak dari segi regulasi dan program pemerintah tetapi pelayanan kesehatan diatasnya dapat membina dari segi kasus-kasus medis sehingga proses penyegaran keilmuan dan pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Tingkat pembinaan dan diharapkan dimasa datang mampu memberikan pengendalian ditunjukkan dari *proses internal-vertikal* yang mana suatu propinsi bertanggung jawab kepada seluruh sistem pelayanan penanganan sampah mulai dari RS Pemerintah di tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota sampai dengan RT di lingkungan kota Balikpapan.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu

dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Objek yang di maksud dalam penelitian ini adalah pengelolaan kebersihan Kota Balikpapan melalui pendidikan partisipatif masyarakat.

Penggunaan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyesuaian dalam pendekatan kualitatif menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Dalam penelitian ini peneliti langsung mengumpulkan data dalam situasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu peneliti turun sendiri ke lapangan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa gambaran tentang pengelolaan kebersihan Kota Balikpapan melalui pendidikan partisipatif masyarakat.⁶

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pondok pesantren yang ada di Kota Balikpapan yang berjumlah 26 pondok pesantren dan Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan.

Dari populasi tersebut, sampel diambil secara acak (*random sampling*). Kepala Pondok sebagai informan kunci serta ustadz-ustadzah yang terkait, karyawan Pondok pesantren juga sebagai informan pendukung. Penentuan sampel didasarkan atas seberapa besar dan akurat informasi yang akan diperoleh dari responden itu. Pimpinan Pondok misalnya dipilih sebagai informan kunci

⁶ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja, 2002), hal 54

karena beliau mampu memberikan informasi tentang bagaimana pengelolaan kebersihan pondok pesantren secara lebih komprehensif dan utuh.

Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh adalah berkaitan dengan bagaimana pengelolaan kebersihan pondok pesantren yang dilaksanakan di pondok pesantren tersebut. Informasi dari dokumentasi dan observasi dan angket dijadikan sebagai bahan pembandingan dengan informasi yang diperoleh dari pimpinan pondok, dan unsur kependidikan terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang pengelolaan kebersihan di pondok pesantren, maka dilakukan beberapa tahapan untuk pengumpulan data. Sesuai dengan prinsip penelitian dengan pendekatan kualitatif, pada tahap pertama dilakukan orientasi yakni peneliti mengumpulkan data secara umum dan luas tentang hal-hal yang menonjol, penting dan berguna untuk diteliti. Tahap kedua, peneliti melakukan eksplorasi untuk pengumpulan data yang dilakukan lebih terarah sesuai dengan fokus penelitian serta mengetahui sumber data atau informasi yang kompeten dan mempunyai pengetahuan yang cukup banyak tentang hal akan diteliti. Tahap ketiga, peneliti melakukan penelitian terfokus yaitu mengembangkan penelitian eksplorasi kepada fokus penelitian yaitu pengelolaan kebersihan pondok pesantren-pondok

pesantren di Kota Balikpapan. Dalam penelitian hal ini pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan angket.⁷

4. Teknik Pengolahan Data

Sesuai dengan rancangan penelitian ini yakni penelitian kualitatif, teknik analisis data dalam penelitian adalah dengan pendekatan analisis isi. Langkah-langkah dalam yang dilakukan dalam analisis isi adalah sebagai berikut; *pertama*, melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara dan angket yang dilakukan terhadap pimpinan pondok, pengurus, dan kepada ustadz-ustadz pondok pesantren yang menjadi responden dalam penelitian ini. *Kedua*, melakukan klasifikasi terhadap data yang berupa hasil wawancara dan hasil penyebaran angket. *Ketiga*, melakukan reduksi atau pengurangan terhadap data yang tidak sesuai dengan konteks penelitian. *Keempat*, melakukan inferensi dengan menghubungkan hasil wawancara, dokumentasi dan angket yang telah dikumpulkan. Dan *kelima*, menganalisa data yang disajikan dengan uraian kata terhadap pengelolaan kebersihan pondok pesantren.

Untuk mendapatkan keabsahan data penelitian, peneliti mengacu kepada tiga aspek yang harus dipenuhi, antara lain: ⁸

⁷ Lexy J Moelong, *Metode...*, hal 171.

⁸ Lexy J Moelong, *Metode ...*, hal 173.

- a. Kredibilitas data. Kredibilitas data diperoleh dengan mengambil sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian tentang pengelolaan kebersihan di pondok pesantren-pondok pesantren di Kota Balikpapan. Kredibilitas data dicapai dengan usaha memperoleh data dari responden yang terlibat langsung dalam pengelolaan kebersihan di pondok pesantren-pondok pesantren di Kota Balikpapan.
- b. Keteralihan (*transferabilitas*) data. Keteralihan data dilakukan apabila terdapat responden memiliki jawaban yang sama atau sejenis. Data tersebut kemudian dipadukan dan saling menunjang satu dengan lainnya.
- c. Kebergantungan dan kepastian data. Aspek ini berarti data yang diperoleh menjadi tolok ukur analisis pada bagian berikutnya. Hasil pengumpulan data itu benar sesuai dengan keadaan pada saat itu.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini berisi lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan. Dalam bab ini dikemukakan urgensi penelitian dan ciri beda penelitian ini dengan penelitian yang ada sebelumnya.

Bab II berisi Deskripsi Umum Kota Balikpapan yang meliputi subbab situasi, kondisi, visi dan misi kota Balikpapan, dan kondisi kependudukan kota Balikpapan, organisasi-organisasi Islam yang ada di Kota Balikpapan, dan Peraturan Pemerintah daerah Kota Balikpapan tentang kebersihan. Bab ini berfungsi untuk memberikan latar (setting) geografi tempat penelitian, sehingga tidak lepas dari konteks di mana penelitian dilakukan.

Bab III berisi tentang pendidikan partisipatif dan pembangunan lingkungan masyarakat (arti pendidikan partisipatif, kesadaran masyarakat akan kebersihan, analisa situasi sistem kesehatan masyarakat, dan pendekatan model sistem kesehatan masyarakat), madani (isyarat Al-Qur'an mengenai masyarakat madani dan karakteristik lain masyarakat madani).

Bab IV berisi laporan hasil dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian dideskripsikan kemudian dianalisis sehingga ditemukan hasil pendidikan partisipatif pondok pesantren dan MUI terhadap kebersihan lingkungan di kota Balikpapan, terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan.

Bab V berisi penutup yang berupa kesimpulan dan saran, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini dan saran kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.

BAB II

DESKRIPSI UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Kota Balikpapan

1. Situasi dan Kondisi Kota Balikpapan

Kota Balikpapan selain sebagai pusat pembangunan wilayah Kalimantan Timur, berfungsi sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur. Kota Balikpapan juga merupakan pusat perdagangan dan jasa yang perekonomiannya sangat dipengaruhi oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel, sektor angkutan dan komunikasi, bangunan/konstruksi serta industri pengolahan.

Berbagai potensi pengembangan ekonomi yang terdapat di Kota Balikpapan sejauh ini telah berkembang dengan pesat seiring dengan laju perkembangan dan pertumbuhan kota. Sektor industri yang ada di Balikpapan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 subsektor, yaitu aneka industri, industri kimia dasar, industri mesin dan logam dasar (IMLD), serta industri kecil. Jumlah perusahaan industri dan tenaga kerja meningkat produkvitasnya, hingga tahun 2004 tercatat sebanyak 580 perusahaan industri terdapat di Kota Balikpapan dengan jumlah tenaga kerja sebesar 7.261 orang.

Potensi kegiatan perekonomian suatu wilayah/kota, pada dasarnya merupakan daya tarik bagi penduduk untuk melakukan usaha di berbagai sektor, karena terdapatnya peluang yang cukup besar untuk berusaha. Disamping itu, potensi perekonomian ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur tingkat pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah/kota.

Sejalan dengan dilaksanakannya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka peran pembangunan akan bergeser dari tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pada masa yang akan datang peran pemerintah lebih di arahkan kepada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengelola dan melaksanakan pembangunan di daerah, yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota serta mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hal ini dipandang penting, mengingat bahwa keterbatasan dana yang tersedia pada pemerintah dalam melaksanakan pembangunan tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda kegiatan pembangunan ekonomi pada kawasan perkotaan.

Upaya memperkuat dan memperluas dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi sangat memungkinkan mengingat potensi yang dimiliki masyarakat, swasta dan pemerintah, namun tersebar pada berbagai wilayah yang tidak terencana, tidak terinventarisir dengan baik dan pada akhirnya akan dapat

mengganggu kelancaran kegiatan ekonomi tersebut mengingat kegiatan investasi terutama pada sektor riil perlu kiranya didorong peningkatannya.

Memperkuat dan memperluas peran serta investor dalam pembangunan ekonomi tidak hanya membutuhkan dukungan terhadap pembinaan usahanya, namun perlu juga mempersiapkan informasi yang tepat tentang profil proyek investasi yang telah berjalan serta yang prospektif dikembangkan ke depan. Hal tersebut disusun selain untuk memberikan informasi tentang keberadaan investasi yang telah ada, juga untuk memberikan informasi pembanding bagi investor yang akan masuk sekaligus sebagai referensi bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya di Kota Balikpapan.

2. Visi dan Misi Kota Balikpapan

a. Visi

Visi Kota Balikpapan Tahun 2006 -2011 adalah *"Balikpapan sebagai sentra industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang oleh penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dari masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju (madinatul iman).*

Visi ini menyiratkan agar Kota Balikpapan tetap fokus kepada kegiatan ekonomi kota yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, dalam arti sesuai dengan peluang dan potensi yang dimiliki oleh Kota Balikpapan yaitu sektor industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Dengan pemilihan sektor ekonomi tersebut diharapkan kota Balikpapan akan

dapat mampu bersaing dan menempatkan diri sebagai salah satu kota utama di Kawasan Timur Indonesia.. Namun demikian, visi tersebut perlu didukung oleh praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang harus dilakukan oleh segenap aparatur Pemerintah Kota dan didukung pula oleh masyarakatnya yang religius dan berbudaya (*Masyarakat Madani*) sebagai mandat masyarakat untuk menjadikan Balikpapan sebagai Kota Beriman dalam arti yang sesungguhnya.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi Jangka Panjang tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan, maka ditetapkan Visi jangka menengah yang merupakan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih untuk lima tahun pada periode 2006-2011 sebagai acuan operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahunan, yaitu: Menata Kembali dan Membangun Balikpapan dengan Prinsip *Good Governance* dan *Masyarakat Madani*. *Good Governance* adalah tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik dan penegakan hukum. Sedangkan masyarakat madani yaitu tatanan masyarakat yang hidup rukun dan harmonis berperadaban modern, maju dan sejahtera serta memiliki nilai moralitas dan spiritualitas tinggi berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang untuk 20 tahun ke depan yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sumberdaya manusia yang Beriman, sehat jasmani dan memiliki daya saing dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu membangun manusia Balikpapan dengan mengedepankan pembangunan aspek mental yang didukung oleh kesehatan jasmani dan penguasaan ilmu dan teknologi dengan mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar manusia secara berkualitas sehingga sebagai manusia mampu berperan dalam aktualisasi diri dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan pada umumnya dan kehidupan kota pada khususnya.
- 2) Mewujudkan tersedianya infrastruktur Kota yang mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan fungsi Kota di masa depan yaitu membangun infrastruktur kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung fungsi kota Balikpapan pada masa yang akan datang, baik fungsi internal maupun fungsi eksternal kota sesuai dengan kedudukan kota Balikpapan dalam konteks regional maupun nasional.
- 3) Mewujudkan kondisi kota yang layak huni dan berwawasan lingkungan yaitu membangun kota dengan mengindahkan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan sehingga kota akan menjadi satu kesatuan ekosistem yang layak dihuni oleh warga kotanya.

- 4) Mewujudkan perekonomian kota yang berorientasi kepada pengembangan potensi ekonomi kerakyatan dan pengembangan basis ekonomi Kota di masa depan yaitu membangun sistem ekonomi yang memungkinkan potensi ekonomi rakyat dapat berkembang, disamping mengembangkan basis ekonomi Kota Balikpapan dalam rangka mempersiapkan peranan Kota Balikpapan sebagai Kota Industri, Perdagangan dan Jasa.
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan membangun sistem pemerintahan modern yang bebas KKN dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik serta menerapkan azas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik seperti partisipasi, transparansi/keterbukaan dan akuntabilitas dari mulai Pemerintahan di tingkat Kota sampai kepada unit pelayanan masyarakat.
- 6) Mewujudkan penegakan hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dengan membangun suatu sistem regulasi daerah yang dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang dapat diterapkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk melaksanakan Misi jangka panjang tersebut, maka Misi jangka menengah tahun 2006-2011 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengentasan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan dengan menekan jumlah penduduk miskin dan penduduk rentan agar tidak menjadi miskin

melalui pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan dan peningkatan kualitas atau mutu penyelenggaraan pelayanan bagi penduduk miskin agar dapat mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial dan ekonominya.

- 2) Peningkatan Sumber Daya Manusia. Mengembangkan Sumber Daya Manusia dengan mengupayakan agar warga Balikpapan mampu “menjadi tuan di rumah sendiri”, yaitu membangun manusia-manusia Balikpapan dengan mengedepankan aspek mental dan unggul dalam penguasaan ilmu dan teknologi, mempunyai jiwa entrepreneur serta memiliki keimanan, ketaqwaan serta budi pekerti yang tinggi sehingga mampu menjadi tuan di rumah sendiri.
- 3) Infrastruktur dan Investasi. Mengembangkan infrastruktur dan investasi dengan membangun prasarana kota dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, yaitu membangun infrasturkur kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung fungsi Kota Balikpapan di masa yang akan datang serta mendukung pengembangan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
- 4) Pariwisata dan Lingkungan Hidup. Mengembangkan pariwisata dan lingkungan hidup dengan memelihara kelestarian lingkungan hidup dan suasana kota yang sejuk dan asri,, yaitu membangun kota dengan mengindahkan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan yang baik

sehingga kota akan menjadi satu kesatuan ekosistem yang layak huni oleh warganya dan sebagai tujuan pariwisata.

- 5) Pemberantasan Korupsi. Memberantas korupsi melalui pemberantasan tindak pidana KKN dengan pengawasan ketat dan terbuka, yaitu dengan membangun sistem pemerintahan modern yang bebas KKN dan mampu memberikan pelayanan publik dengan baik, dengan menerapkan azas penyelegaraan tata pemerintahan yang baik disertai transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dari Pemerintahan di tingkat kota sampai ke unit pelayanan masyarakat.
- 6) Kesejahteraan Keluarga. Mengembangkan kesejahteraan keluarga dengan membina keluarga sakinah dan meningkatkan kesejahteraan keluarga sebagai sendi utama kota

3. Kondisi Kependudukan Kota Balikpapan

a. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Kota Balikpapan tahun 2008 (per Desember 2008) berjumlah 601.392 jiwa, yang terdiri dari 317.508 jiwa laki-laki (52,79 %) dan 283.884 jiwa perempuan (47,20%). Dengan demikian berarti rasio jenis kelamin (sex ratio) mencapai 111,84 artinya jika ada 10.000 penduduk perempuan, maka penduduk laki-laki 11.184 jiwa atau 112 : 100.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Per Kecamatan
di Kota Balikpapan Tahun 2006 s/d 2008

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2006	2007	2008
Penduduk	508.120	572.425	601.392
Balikpapan Selatan	173.040	198.544	209.956
Balikpapan Timur	49.665	55.080	58.550
Balikpapan Utara	94.433	111.671	119.197
Balikpapan Tengah	106.184	117.446	120.239
Balikpapan Barat	84.798	89.684	93.450
Penyebaran	100.00	100.00	100.00
Balikpapan Selatan	34.05	34,68	34,91
Balikpapan Timur	9.77	9.77	9,73
Balikpapan Utara	18.58	19,51	19,82
Balikpapan Tengah	20.90	20.51	19,99
Balikpapan Barat	16,69	15,66	15,54
Kepadatan	1.009,58	1.137	1,194
Balikpapan Selatan	3,608,76	4,140	4,379
Balikpapan Timur	375,79	417	443
Balikpapan Utara	714,48	845	902
Balikpapan Tengah	9.592,05	10.609	10.862
Balikpapan Barat	471,23	498	519

Sumber: Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Balikpapan, 2008.

Tabel 2. Penduduk Kota Balikpapan Per Kecamatan
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008

No	Uraian	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Laki- laki	317.508	52,79
2	Perempuan	283.884	47,20
3	Jumlah	601.392	100.0
4	Sex Ratio	111.84	
5	Anak-anak (0-14 th)	144.578	24,04
	Dewasa (15-64 th)	442.231	73,53
	Tua/lanjut (³ 65)	14.583	2.42
	Jumlah	601.392	100.00
	Dependency Ratio	35,99	

Sumber: Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, 2008.

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan periode tahun 2006-2008 sebesar 1,52 % yang terdiri dari pertumbuhan alami 1,34 % dan migrasi 0,18 %. Namun dalam kurun waktu tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 ternyata laju pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan berkisar 1,054 %.

c. Angkatan Kerja

Angkatan kerja di Kota Balikpapan tahun 2007 mencapai 226.351 orang (55,02%), sedangkan yang bukan merupakan angkatan kerja sebesar 185.023 orang (44,98%) dan penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja sebesar 55,02 %, artinya dari 100 penduduk usia kerja terdapat 55 orang angkatan kerja. Rasio tingkat ketergantungan total sebesar 1:5 Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2007

Kegiatan Utama	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	N	%	N	%	N	%
Angkatan Kerja	156.631	73,72	69.720	35,05	226.351	55,02
1 Bekerja	145.491	68,48	64.969	32,66	210.460	51,16
2 Mencari kerja	11.140	5,24	4.751	2,39	15.891	3,86
Bukan Angkatan Kerja	558.356	26,28	129.188	64,95	185.023	44,98
1 Sekolah	38.846	18,28	33.409	16,80	72.255	17,56
2 Mengurus RT	3.251	1,53	88.657	44,57	91.908	22,34
3 Lainnya	13.738	6,47	7.122	3,58	20.860	5,07
Total	217.793	100,00	195.276	100,00	413.069	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2007.

Ditinjau dari angkatan kerja menurut golongan umur 10 – 60 tahun pada tahun 2006, terlihat bahwa jumlah angkatan kerja laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan, yaitu berjumlah masing-masing 217.793 orang dan 195.276 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Kota Balikpapan Tahun 2006

Golongan Umur	Laki-Laki		Perempuan		Gabungan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
10 – 19	46.801	21,49	41.209	21,10	88.010	21,31
20 – 29	52.572	24,60	50.221	25,72	103.793	25,13
30 – 39	47.651	21,88	43.749	22,40	91.400	22,13
40 – 49	35.106	16,12	31.125	15,94	66.231	16,03
50 – 59	21.139	10,01	15.349	8,32	36.488	10,33
60 Keatas	8.793	4,04	12.165	6,23	20.958	5,07
Jumlah	271.793	100,00	195.276	100,00	413.069	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2006.

Jumlah penduduk usia kerja di Kota Balikpapan yang bekerja pada sektor formal berjumlah 149.010 orang atau 75,01%. Sedangkan jumlah penduduk usia kerja yang bekerja di luar sektor informal berjumlah 49.642 orang atau 24,99%. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk berumur 10 tahun keatas yang bekerja menurut status pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kota Balikpapan Tahun 2006

Status Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Formal	115.250	78,87	33.760	64,28	149.010	75,01
Berusaha dgn buruh tetap/dibayar	5.449	3,80	1.223	2,61	6.672	4,62
Buruh/karyawan	107.121	73,30	32.716	62,29	139.837	70,39
Informal	30.882	21,13	18.760	35,72	49.642	24,99
Berusaha sendiri	2.805	1,92	2.951	5,62	5.756	2,90
Berusaha dengan buruh	24.839	17,00	13.563	25,82	38.402	21,32
tidak tetap/tidak dibayar	536	0,37	-	-	536	0,27
Pekerjaan bebas	1.803	1,23	177	0,34	1.980	1,00
dipertanian	899	0,62	2.069	3,94	2.968	1,49
Pekerjaan bebas non pertanian						
Pekerjaan tidak dibayar						
Jumlah	146.132	100,00	52.520	100,00	198.652	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2005.

Berdasarkan lapangan usaha tahun 2006, penduduk Kota Balikpapan yang paling besar bekerja pada sektor perdagangan dan perhotelan, yaitu berkisar 30,30 % dari total penduduk usia kerja. Sedangkan sektor yang paling rendah adalah pada sektor lapangan usaha listrik, yaitu sebesar 0,41 %. Untuk lebih jelasnya mengenai penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha di Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
di Kota Balikpapan Tahun 2006

Jenis Pekerjaan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sektor A (Agriculture) Pertanian	7.878	5,39	1.069	2,04	8.947	4,50
Sektor M (Manufacture) Pertambangan dan Penggalian Industri Listrik, Gas, dan Air Minum Bangunan	48.360 21.061 6.661 824 19.814	33,09 14,41 4,56 0,56 13,56	3.857 811 2.235 - 811	7,34 1,54 4,26 - 1,54	52.217 21.872 8.896 824 20.625	26,29 11,01 4,48 0,41 10,38
Sektor S (Services) Perdagangan Restoran dan Hotel Angkutan dan Komunikasi Bank dan lembaga Keuangan Jasa- jasa	89.894 35.416 18.631 11.456 23.391	61,52 2,24 12,75 7,84 16,69	47.594 24.785 2.873 3.135 16.801	90,62 47,19 5,47 5,97 31,99	137.488 60.201 21.504 14.591 41.192	69,21 30,30 10,82 7,35 20,74
Jumlah	146.132	100,00	52.52	100,00	198.652	100,00

Sumber : BPS Kota Balikpapan, 2006.

d. Tingkat Pendidikan

Perkembangan jumlah penduduk berusia 10 tahun ke atas ditinjau dari status pendidikannya di Kota Balikpapan pada tahun 2006 tercatat sebesar 1,74% tidak/belum pernah sekolah, 12,01 % penduduk yang tidak

menamatkan pendidikan SD, 20,90% penduduk yang tamat SD, 42,131% penduduk yang tamat SLTP/MTs, 35,55 % penduduk tamat SLTA dan 9,84% penduduk yang menamatkan pendidikan D1 sampai dengan universitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2005

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Jumlah	Persen
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	11.264	2.85
Tidak Tamat SD	48.619	12.29
SD	91.579	23.15
SLTP/MTs	83.168	21.03
SLTA	126.606	32.01
D1 s/d Universitas	34.303	8.97
Jumlah	395.539	100.00

Sumber : BPS Kota Balikpapan, 2006

e. Perekonomian

1) Kondisi Perekonomian Daerah

Total Nilai PDRB Kota Balikpapan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 24,20 trilyun (angka sementara) jika dinilai atas dasar harga berlaku, sedangkan jika dinilai atas dasar harga konstan atau harga pada tahun dasar 2000 maka total PDRB Kota Balikpapan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 13,31 trilyun. Dari nilai total PDRB tersebut, apabila kegiatan

sektor migas dikeluarkan (yaitu kegiatan penambangan migas dan industri pengolahan migas), maka nilai PDRB pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 10,85 trilyun atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 11,77 trilyun. Perkembangan PDRB, baik dengan migas atas dasar harga berlaku dan konstan di Kota Balikpapan dari tahun 2001 sampai dengan 2006 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Perkembangan PDRB Tahun 2000-2006

No	Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
1	2001	10.930.081,45	10.802.001,89
2	2002	13.387.568,07	11.287.932,44
3	2003	13.689.485,87	11.528.658,20
4	2004	16.953.594,47	12.228.687,32
5	2005	22.344.548,99	12.624.049,90
6	2006*	24.202.387,18	13.310.807,30

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2006.

**) Angka Sementara.

2) Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan

Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan selama tahun 2006 atas dasar harga konstan, pada tahun 2006 mengalami peningkatan mencapai 1,05 % (total) dimana pada tahun 2006 sebesar Rp. 13.310.807,30 juta dan tahun 2005 sebesar Rp. 12.624.049,90 juta. Sedangkan berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 1,08 %, yaitu Rp. 22.344.548,99 juta pada tahun 2005 menjadi Rp. 24.202.387,18 juta pada tahun

2006. Untuk lebih jelasnya mengenai laju pertumbuhan PDRB secara total dan tanpa migas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 8. Persentase Laju Pertumbuhan PDRB
Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan**

No	Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
1	2001	11,34	10,04
2	2002	22,48	4,50
3	2003	2,28	2,13
4	2004	23,84	6,07
5	2005	31,80	3,23
6	2006	8,31	5,44

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2005.
*) Angka Sementara.

Jika diamati menurut sektor ekonomi selama beberapa tahun terakhir (tahun 2001-2006), sektor-sektor yang ada mengalami fluktuatif. Untuk lebih jelasnya mengenai laju pertumbuhan PDRB sektoral di Kota Balikpapan atas dasar harga konstan 2000 dengan migas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Persentase Laju Pertumbuhan PDRB
Sektoral di Kota Balikpapan Tahun 2000-2005

Sektor	Pertumbuhan (%)						Rata-Rata
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
Pertanian	11,63	5,21	10,73	5,19	-3,20	4,41	6,09
Pertambangan dan Penggalan	19,73	11,30	7,75	7,83	2,53	8,06	8,19
Industri Pengolahan	6,57	0,14	-5,62	7,16	-1,70	3,49	1,68
Listrik, Gas dan Air Bersih	16,73	-6,28	35,50	2,90	26,72	11,61	13,64
Bangunan	25,17	7,95	9,54	8,89	17,98	12,68	13,27
Perdagangan, Hotel & Restoran	14,11	8,02	11,90	3,22	5,79	5,84	7,95
Pengangkutan dan Komunikasi	4,67	17,24	5,55	4,55	5,09	5,10	6,91
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	18,09	11,93	6,55	10,94	8,60	7,43	8,81
Jasa-Jasa	11,34	7,74	2,96	9,29	4,47	4,64	6,03
Total PDRB	10,04	4,50	2,13	8,07	3,23	5,44	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2006.

Struktur perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2006 secara total berdasarkan harga berlaku menunjukkan bahwa sektor industri, perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi yang paling dominan dibandingkan sektor-sektor yang lain, khususnya untuk industri migas/pengilangan minyak bumi dan gas alam cair sebesar 57,22. Sedangkan untuk sektor perdagangan, hotel

dan restoran menyumbang kontribusi sebesar 20,45%. Hal tersebut menggambarkan bahwa Kota Balikpapan masih merupakan kota industri, jasa dan perdagangan.

Sedangkan sektor yang paling kecil memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Balikpapan adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,03 % diikuti sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,93%, sektor pertanian sebesar 1,65% dan jasa lainnya sebesar 2,76%. Untuk lebih jelasnya mengenai kontribusi tiap sektor terhadap PDRB Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10. Kontribusi Sektoral PDRB
Kota Balikpapan Berdasarkan PDRB Total
dengan Migas Tahun 2005 (Atas Dasar Harga Berlaku)

Sektor	Distribusi (%)					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Pertanian	2,72	2.15	2.43	2.18	2.68	1.65
Pertambangan dan Penggalian	0,04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03
Industri Pengolahan	48,20	51.24	46.13	52.78	59.44	57.22
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,63	0.62	0.95	0.87	0.85	0.93
Perdagangan, Hotel & Restoran	26,07	24.78	27.67	23.35	19.09	20.45
Bangunan	8,04	7.24	8.01	7.29	6.96	7.43
Pengangkutan dan Komunikasi	8,32	7.98	8.34	7.18	6.08	6.02

Sektor	Distribusi (%)					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	3,03	3.11	3.38	3.44	3.35	3.51
Jasa-Jasa	2,95	2.84	3.04	2.86	2.59	2.76
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2006.

Dalam perkembangan PDRB secara total pada periode tahun 2001-2006, Kota Balikpapan masih didominasi oleh sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, air bersih, dan bangunan/konstruksi) dan sektor tersier (perdagangan, restoran & hotel, pengangkutan & komunikasi, bank dan keuangan lainnya, sewa rumah, pemerintahan, hankam serta sektor jasa-jasa). Kedua sektor tersebut merupakan sektor-sektor modern dan sudah memerlukan sumber daya manusia maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Terakhir adalah sektor primer (pertanian, pertambangan dan pengalihan) yang merupakan sektor yang sangat bergantung kepada sumberdaya alam. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur ekonomi Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11. Struktur Ekonomi Menurut Klasifikasi Sektor Primer, Sekunder dan Tersier (dengan Migas) di Kota Balikpapan Tahun 2001-2005 (Atas Dasar Harga Berlaku)

Sektor	Indeks Perkembangan (%)					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006*
Sektor Primer (Sektor 1,2)	2.76	2.18	2.47	2.21	1.71	1.68
Sektor Sekunder (Sektor 3,4,5)	56.87	59.10	55.09	60.94	67.25	65.58
Sektor Tersier (Sektor 6,7,8,9)	40.37	38.72	42.44	36.85	31.04	32.74

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2006.

Catatan

- 1 = Pertanian
- 2 = Pertambangan & Penggalian
- 3 = Industri Pengolahan Perusahaan
- 4 = Listrik dan Air Bersih
- 5 = Bangunan/Konstruksi
- 6 = Perdagangan, Restoran dan Hotel
- 7 = Pengangkutan dan Komunikasi
- 8 = Keuangan, Persewaan & Jasa
- 9 = Jasa-jasa

Sedangkan struktur ekonomi Kota Balikpapan menurut klasifikasi sektor primer, sekunder dan tersier tanpa migas tahun 2001-2006 atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 12. Struktur Ekonomi Menurut Klasifikasi Sektor Primer, Sekunder dan Tersier di Kota Balikpapan Tahun 2001-2005 (Atas Dasar Harga Berlaku)

Sektor	Indeks Perkembangan (%)					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006*
Sektor Primer (Sektor 1,2)	2.67	2.18	2.47	2.21	1.71	1.68
Sektor Sekunder (Sektor 3,4,5)	61.28	59.10	55.09	60.94	67.25	65.58
Sektor Tersier (Sektor 6,7,8,9)	38.11	38.72	42.44	36.04	31.04	32.74

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2006.

Catatan

- 1 = Pertanian
- 2 = Pertambangan & Penggalian
- 3 = Industri Pengolahan Perusahaan
- 4 = Listrik dan Air Bersih
- 5 = Bangunan/Konstruksi
- 6 = Perdagangan, Restoran dan Hotel
- 7 = Pengangkutan dan Komunikasi
- 8 = Keuangan, Persewaan & Jasa
- 9 = Jasa-jasa

3) Pendapatan Per Kapita Kota Balikpapan

Pendapatan per kapita Kota Balikpapan tahun 2006 dihitung secara total atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp. 27.295.465,-. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan pendapatan perkapita tahun 2005

yakni sebesar Rp. 25.170.298,-, maka secara riil turun sebesar Rp. 2.125.167,- . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13. Perkembangan Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Kota Balikpapan Tahun 2006

Tahun	Total (dengan Migas)	
	Nilai (Rp) 000.000	Pertumbuhan (%)
2001	14.581.997	5.17
2002	16.278.066	11.63
2003	16.704.563	2.62
2004	19.939.023	19.63
2005	25.170.298	26.24
2006*	27.295.465	8.44

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2006.

*) data sementara

4) Perbandingan Antara Laju Pertumbuhan PDRB, Pendapatan Per Kapita dan Laju Inflasi

Pada tahun 2006, Kota Balikpapan memiliki selisih antara laju pertumbuhan PDRB dengan laju inflasi sebesar 0,71 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2005 terjadi penurunan selisih angka, dimana pada tahun 2005 selisih antara pertumbuhan PDRB dengan laju inflasi sebesar 14,5%. Hal tersebut dimungkinkan oleh terjadinya kenaikan bahan pokok seiring dengan kenaikan bahan-bahan minyak, sehingga dengan demikian menurunkan daya beli masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai

perbandingan pertumbuhan PDRB, Pendapatan Perkapita dan Inflasi Kota Balikpapan dapat dilihat pada Tabel 2.20 berikut.

Tabel 14. Persentase Perbandingan Pertumbuhan PDRB, Pendapatan Perkapita dan Inflasi Kota Balikpapan Tahun 2001-2006

Tahun	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Laju Inflasi (IHK)
	Total	Total	
2001	11,34	5,17	10,8
2002	22,48	11,63	11,4
2003	2,26	2,62	5,9
2004	23,84	19,36	7,6
2005	31,80	26,24	17,3
2006*)	8,31	8,44	7,6

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2006.

f. Prasarana Perkotaan: Jaringan Air Bersih

Dalam memenuhi kebutuhan air minum/air bersih bagi masyarakat Kota Balikpapan, peningkatan pelayanan air bersih masih terus mendapatkan perhatian dari pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan cara optimasi produktivitas beberapa instalasi penampungan air yang ada, pembuatan sumur bor, mengurangi tingkat kebocoran serta mengupayakan kerja sama dengan pihak swasta.

Disadari bahwa sumber daya air di Kota Balikpapan relatif sangat terbatas baik dari air permukaan maupun sumber air bawah tanah. Kapasitas air baku yang ada sampai saat ini belum memadai sehingga sering mengalami gangguan penyediaan air bersih khususnya pada musim kemarau. Dalam memenuhi kebutuhan air minum/air bersih bagi masyarakat Kota Balikpapan, sistem pengelolaan dilakukan oleh beberapa sumber, antara lain:

- 1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Balikpapan mengambil air dari Waduk Manggar, Sungai Klandasan Besar, sumber mata air Gunung Sari Ilir yang didistribusikan melalui pipa/ledeng serta melalui mobil tangki air. Adapun daerah-daerah yang dapat dilayani oleh PDAM masih terbatas pada daerah yang memiliki ketinggian dasar kurang dari 30 meter dari pipa induk.
- 2) Pertamina DAK mengelola dan mensuplai air minum/air bersih bagi kebutuhan karyawan Pertamina dan kebutuhan industri kilang minyaknya, dimana air baku diambil dari Sungai Wain dan Sumur Bor.
- 3) Usaha swasta yang mengelola dan mensuplai kebutuhan air bagi masyarakat, khususnya selain konsumen PDAM dan Pertamina DAK mengusahakan melalui sumur-sumur bor yang terdapat di Kelurahan Gunung Sari Ilir dan menjualnya melalui mobil tangki air.

- 4) Pengadaan air minum/air bersih yang dilakukan oleh penduduk melalui sumur pompa dangkal maupun pompa dalam dan sumur gali.

Sampai saat ini di Kota Balikpapan terdapat jaringan PDAM berupa panjang pipa transmisi/distribusi dan pipa tersier 582.190 m, dengan Terminal Air Hydran Umum (TAHU) sebanyak 85 buah, jumlah loket 7 dan yang sudah menggunakan komputer sebanyak 7 buah. Untuk menunjang pengelolaannya terdapat beberapa fasilitas jaringan PDAM antara lain: Bangunan Intake + Pompa Waduk Manggar dan Bangunan Intake + Sungai Klandasan.

1) Sumber Air Baku

Sumber Air baku yang dikelola PDAM saat ini berasal dari:

- a) DAM/Waduk Manggar (daya tampung 3,3 juta m³ dengan produksi 1.900m³/jam),
- b) Sungai Klandasan (50 l/det),
- c) Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Damai (400 l/det),
- d) Reservoir Kampung Damai (1.650 m³),
- e) Sumur bor Gunung Tambak (3,5 l/det),
- f) Sumur bor Gunung Sari (80 l/det),
- g) Reservoir Martadinata (150 m³),
- h) Reservoir Telaga Sari (3.400 m³),
- i) Reservoir Sepinggian (500 m³).

Adapun volume air yang dapat ditampung Dam/Waduk Manggar sangat dipengaruhi oleh musim. Pada musim kemarau kapasitas volume air akan turun secara drastis. Begitu pula dengan sumber air baku dari Sungai Klandasan Ilir Besar juga dipengaruhi oleh musim. Sedangkan sumber air dari sumur gali/bor untuk saat ini belum dapat dikatakan sumber air baku yang dapat dipertanggungjawabkan karena mengandung kadar besi (Fe) yang cukup tinggi.

2) Sistem Distribusi

Jaringan pipa distribusi masih belum mencakup seluruh daerah perkotaan terutama kawasan yang jauh dari pusat kegiatan. Sistem distribusi air bersih dilakukan dengan cara pemompaan dan gravitasi. Pada saat pemakaian minimum, reservoir diisi dan pada saat pemakaian puncak, kebutuhan air dipenuhi dari reservoir tersebut yang dialirkan dengan cara gravitasi.

Jaringan pipa distribusi saat ini belum mencakup seluruh daerah perkotaan terutama pada kawasan yang jauh dari pusat kegiatan kota. Perkembangan produksi, pemakaian air minum, dan jumlah pelanggan air minum di Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 15. Perkembangan Jumlah Produksi, Pelanggan, Pengguna serta Prosentase Penggunaan terhadap Produksi Air Minum di Kota Balikpapan Tahun 2001-2006

Tahun	Jumlah Pelanggan Air Minum (Orang)	Jumlah Produksi Air Minum (m3)	Penggunaan Air Minum (m3)	Prosentase Penggunaan Terhadap Produksi (%)
2001	56.288	19.388.472	13.679.716	70,56
2002	58.495	20.515.166	14.613.404	71,23
2003	57.908	17.236.057	11.298.002	65,55
2004	60.613	18.580.973	12.436.930	66,93
2005	63.094	19.143.886	12.680.886	66,24
2006	65.240	19.752.684	13.025.465	67,46

Sumber : PDAM Kota Balikpapan, 2006.

Penggunaan air bersih yang dikelola PDAM Kota Balikpapan bervariasi untuk berbagai kepentingan, yaitu rumah tangga, pertokoan/niaga, industri barang/jasa, sosial, sekolah, instansi pemerintah. Jumlah penerimaan air minum dan penerimaan uang sewa PDAM Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 16. Jumlah Penggunaan Air Minum Ditinjau Dari Golongan dan Penerimaan Uang Jasa PDAM Kota Balikpapan Tahun 2000-2005

Tahun	Golongan Pemakai						
	Swasta/ Rumah Tangga (m3)	Perushn. Besar /Kecil (m3)	Sosial Umum/ Khusus (M3)	Instansi Pemrnth. &Mobil Tangki (M3)	Industr i (M3)	Pelabu han (M3)	Juml ah
2001	11.573.258	1.189.991	509.282	343.387	20.995	39.009	13.67 6.022
2002	12.368.925	1.228.666	612.322	287.969	16.185	46.534	14.56 0.601
2003	9.463.244	988.432	532.327	243.953	35.490	34.456	11.29 8.002
2004	10.473.493	271.392	554.978	287.969	16.185	46.534	11.65 0.551
2005	10.816.731	996.225	502.003	324.269	16.520	25.138	12.68 0.886
2006	11.253.267	1.140.288	526.058	382.256	16.900	28.465	13.34 7.234

Sumber : PDAM Kota Balikpapan, 2006

Jumlah sambungan/pelanggan air bersih yang dilayani PDAM Kota Balikpapan mencakup hampir semua kelurahan di 5 kecamatan, seperti tertera dalam tabel berikut:

Tabel 17. Sambungan/Pelanggan Air Bersih PDAM
Kota Balikpapan Per Kecamatan Tahun 2004-2005

Kecamatan	Banyaknya Pelanggan Air Bersih			Kenaikan
	2004	2005	2006	
Balikpapan Timur	3.157	3.259	2.387	3,23
Balikpapan Selatan	22.963	23.534	24.256	22,52
Balikpapan Tengah	13.431	14.329	15.818	25,27
Balikpapan Utara	12.377	13.075	13.734	5,64
Balikpapan Barat	8.685	8.897	9.251	84,13

Sumber data: PDAM Kota Balikpapan, 2005

g. Prasarana Perkotaan: Jaringan Jalan

Transportasi darat di Kota Balikpapan melayani pergerakan regional dan lokal. Transportasi regional di Kota Balikpapan menghubungkan simpul-simpul regional, yaitu: pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan udara dan pusat kota.

Pola jaringan jalan di Kota Balikpapan pada hakekatnya hanya dibentuk oleh sumbu yang mengarah ke Utara-Selatan dan Timur-Barat. Ruas jalan pada pola Utara-Selatan secara umum dapat dibagi menjadi dua sumbu utama, yaitu :

- a) Jaringan jalan yang menyisir sepanjang pinggir Teluk Balikpapan;

- b) Jaringan jalan yang menghubungkan ke pelabuhan speed boat di Kampung Baru;
- c) Jaringan jalan mulai dari persimpangan Jl. Pandan Sari sampai ke Jl. Karang Anyar.

Kebijaksanaan Pemerintah Kota Balikpapan dalam sektor prasarana jalan meliputi pembangunan jalan baru, peningkatan jalan dan jembatan serta rehabilitasi jalan dalam kota maupun di pinggiran kota. Panjang jalan di Kota Balikpapan adalah 378.773 km dengan klasifikasi jalan negara, jalan propinsi dan jalan kota. Lebih jelasnya mengenai kondisi fisik jalan di Kota Balikpapan tahun 2005 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 18. Kondisi Fisik Jalan di Kota Balikpapan Tahun 2005

Status Jalan	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Baik (Km)	%	Kondisi Sedang (Km)	%	Kondisi Rusak (Km)	%
Jl. Negara	44.550	24.000	53.87	20.550	46.13	0.000	0
Jl. Propinsi	74.105	61.525	83.02	12.030	16.23	0.550	0.75
Jl. Kota	260.118	113.615	43.67	139.223	53.54	7.280	2.79
Jumlah	378.773	119.140	52.57	117.803	45.37	7.830	2.06

Sumber: DPU Kota Balikpapan, 2005.

Selain akses jaringan jalan, jembatan juga memegang peranan penting dalam kelancaran transportasi kota. Panjang jembatan yang ada di Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 19. Kondisi Fisik Jembatan di Kota Balikpapan Tahun 2005

Status Jalan	Panjang Jembatan (Km)	Kondisi Baik (Km)	%	Kondisi Sedang (Km)	%	Kondisi Rusak (Km)	%
Jl. Negara	0.332	0.291	87.65	0.041	12.34	0	0
Jl. Propinsi	0.188	0.111	59.04	0.077	40.95	0	0
Jl. Kota	0.183	0.102	55.73	0.081	44.26	0	0
Jumlah	0.702	0.503	71.65	0.199	28.34	0	0

Sumber: DPU Kota Balikpapan, 2005.

Tabel 20. Panjang Kondisi Jalan, Jembatan, Irigasi di Kota Balikpapan Tahun 2005

Kegiatan	Tahun			Satuan
	2003	2004	2005	
Panjang Jalan	44.550	44.550	44.550	Km
Nasional	73.705	74.105	74.105	Km
Propinsi	162.810	260.118	260.118	Km
Kota	0	0	0	Km
Desa/Lokal	0	0	0	Km
Tol				
Kondisi Jalan				Km
Aspal	-	-	-	Km
Hotmik				Km

Kegiatan	Tahun			Satuan
	2003	2004	2005	
Berbatu Kerikil Tanah				
Jembatan Panjang Jumlah	0.702 33	0.702 33	0.702 33	Km Buah
Irigasi Teknis	0	0	0	M
Primer	0	0	0	M
Sekunder	0	0	0	M
Tersier				
Irigasi Non Teknis	-	-	-	-

Sumber: DPU Kota Balikpapan, 2005.

h. Prasarana Perkotaan: Jaringan Drainase

Berkaitan dengan pembangunan kawasan baru pada area pengembangan pemukiman di Kota Balikpapan saat ini, jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, penataan drainasenya cukup meningkat dan terpadu pelaksanaannya. Namun pada beberapa bagian wilayah kota masih perlu dilanjutkan pembangunan sistem saluran drainasenya. Daerah yang telah memiliki saluran drainase antara lain sepanjang jalan utama kota, kompleks Perumahan Pertamina, serta daerah perkantoran.

Saluran di jalan-jalan utama kota Balikpapan memiliki jenis terbuka, dengan kondisi baik, kecuali di beberapa jalan di Kecamatan Balikpapan Barat. Berdasarkan status pengalirannya, sistem drainase Kota Balikpapan dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Drainase Primer, adalah drainase utama yang berfungsi sebagai daerah tumpahan air dari drainase sekunder dan drainase tersier sebelum ke laut. Drainase juga merupakan aliran-aliran sungai utama yang ada di Balikpapan. Drainase yang ada di Kota Balikpapan adalah Sungai Klandasan Besar, Klandasan Kecil, Manggar Besar, Manggar Kecil, Batakan, Sepinggian, Pandan Sari, Somber dan Wain.
- 2) Drainase Sekunder, adalah wadah pengaliran dari drainase tersier sebelum ke drainase primer. Drainase sekunder tersebut dapat berupa anak-anak sungai dari drainase primer.
- 3) Drainase Tersier, adalah drainase yang merupakan wadah yang umumnya merupakan saluran pembuangan limbah rumah tangga yang berada di lingkungan permukiman maupun perkotaan.

Tabel 21. Panjang Drainase Kota Balikpapan Tahun 2006

Saluran	Kondisi Baik (m)	Kondisi Sedang (m)	Kondisi Rusak (m)	Jumlah (m)
Primer	5.029	3.117	7.457	15.603
Sekunder	32.275	24.158	26.105	82.538
Tersier	89.425	50.655	152.853	292.933

Sumber: DPU Kota Balikpapan, 2006.

Berdasarkan klasifikasi drainase dan tingkat kejenuhan tanah yang dikembangkan dengan kecepatan meresapnya air permukaan tanah, daerah Balikpapan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Daerah yang tidak pernah tergenang seluas 32.875 Ha atau sekitar 65% dari luas wilayah Balikpapan.
- 2) Daerah yang masih tergenang secara periodik seluas 83 Ha atau 0,16% dari luas wilayah, disamping masih sering terjadi genangan apabila musim hujan berkepanjangan yaitu pada daerah sekitar sungai dan dataran rendah lainnya

i. Prasarana Perkotaan: Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Kota Balikpapan dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Perusda serta dibantu oleh masyarakat. Dalam penanganan masalah persampahan, tanggungjawab terhadap kebersihan adalah masing-masing daerah pelayanan yang telah ditentukan, yaitu meliputi:

- a) DKPP bertanggungjawab terhadap kebersihan di daerah-daerah permukiman, pasar, pertokoan/pusat perbelanjaan, perkantoran dan jalan-jalan. Perusda pengelolaannya mencakup penyapuan jalan, pengangkutan sampah, penggusuran sampah di TPA dan pemeliharaan TPA itu sendiri. Pertamina dan perusahaan minyak yang ada di daerah ini mengelola persampahan pada lingkungan kompleks mereka sendiri

dan terpisah dari pengelolaan pemerintah Kota Balikpapan. Namun peran serta masyarakat sangat penting, dimana pengelolaan sampah dilingkungannya masing-masing dibuang pada tempat penampungan sementara (TPS).

- b) Dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tersebar di Kota Balikpapan, kemudian diangkut oleh petugas ketempat pembuangan akhir (TPA) Manggar. Sampah dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu sampah pasar dan non pasar. Yang termasuk kedalam sampah non pasar adalah sampah permukiman, komersial, fasilitas umum, sapuan jalan, kawasan industri, saluran, perkantoran, dll. Banyaknya timbulan sampah dan sampah yang dapat terangkut setiap harinya di Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 22. Timbulan Sampah dan Jumlah Sampah Yang Diangkut Setiap Harinya Tahun 2005

Sumber Sampah	Timbulan Sampah (Ton)	Sampah Yang Diangkut (Ton)	Prosentase Pelayanan (%)
Non Pasar	95.429,25	90.885	95,24
Pasar	17.461,60	16.790	96,15
Jumlah	112.890,85	107.675	95,70

Sumber: DKPP Kota Balikpapan, 2006.

Sedangkan mengenai jumlah sarana angkutan sampah yang terdapat di Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 23. Jumlah Sarana/Armada Sampah yang terdapat di Kota Balikpapan

Jenis Armada	Kapasitas (Ton)	Jumlah (Unit)	Keterangan
Armada DKP			
Dump Truck	4	17	Rusak 1
Dump Truck Encale	3	5	Rusak 1
Truck Biasa	4	5	-
Arm Roll Truck	3	5	-
Compactor Truck	-	-	-
Truck Tangki	2	1	-
Pick Up	1	3	-
Sweeper	-	3	-
Vacuum Truck	2	-	-
Loader	1	1	-
Beghoe	-	1	-
Bulldozer D3/D6	-	2	-
Excavator	-	2	-
Transfer Depo	-	5	-
Container Besar	8	14	-
Container Kecil	1,5	112	-
Gerobak Sampah	1	75	-
Tracking	-	-	-

Sumber: DKPP Kota Balikpapan, 2006.

Walaupun penambahan armada angkutan sampah di Kota Balikpapan terus dilakukan, namun secara keseluruhan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan persampahan:

- 1) Belum efektifnya pengawasan yang dilakukan baik oleh DKPP.

- 2) Dana pembiayaannya masih belum memadai. Masih belum optimalnya partisipasi masyarakat.
 - 3) Masih adanya pembuangan sampah pada lahan-lahan kosong, saluran air, tepi pantai yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Volume sampah di TPA makin bertambah karena tidak musnah dengan sendirinya.
- c) Sedangkan untuk pembuangan sampah sementara (TPS) ditempatkan tersebar dalam wilayah Kota Balikpapan, dengan kondisi pembuatan dari bahan kayu, bata ataupun keramik. Untuk membantu kelancaran pembuangan sampah ke TPS-TPS, digunakan gerobak-gerobak dorong.

B. Ormas Islam

1. Pondok Pesantren di Kota Balikpapan

Bertolak dari prinsip pendidikan pesantren itu, maka lembaga pendidikan ini memiliki andil besar dalam mewujudkan masyarakat yang berkecukupan, masyarakat yang aman, tenteram, maju dan dinamis. Lembaga pendidikan yang mempunyai tugas membentuk pribadi, yang merupakan hasil rangkaian kegiatan yang berlangsung di keluarga, sekolah, pergaulan sehari-hari, tempat hiburan, tempat bekerja, tempat peribadatan dan kegiatan-kegiatan lain dalam masyarakat. Padahal setiap kegiatan manusia akan membekas dalam dirinya. Untuk itu, pengelolaan semua jenis pendidikan dalam rangka mewujudkan

kebaikan tentu akan membawa hasil yang positif demi mencapai tujuan dan cita-cita bersama.

Pendidikan agama yang diberikan di pondok pesantren dapat menimbulkan semangat etos kerja (berusaha) di kalangan santri. Kesiadaan pesantren mengintrodusir jenis keterampilan merupakan satu langkah lebih lanjut dari langkah untuk memberikan pelajaran non agama. Dengan demikian, kegiatan pesantren itu telah berpartisipasi dalam memberikan fasilitas belajar di kalangan rakyat. Sehingga pendidikan pesantren ini perlu dikembangkan, dibantu dan minimal dimengerti sebagai lembaga pendidikan yang turut serta membangun negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini bisa dimengerti bahwa setidaknya-tidaknya dengan lembaga pendidikan pesantren itu kualitas warga negara mendapatkan perbaikan.⁹

Hal lain yang pantas diketengahkan adalah semangat belajar di kalangan santri yang belajar atas dasar kesadaran untuk perbaikan dirinya. Tujuan mereka belajar tidak semata-mata untuk mengejar keperluan duniawi, namun lebih daripada itu mereka ingin mengetahui untuk bisa menerapkan nilai-nilai moral Islami sesuai ajarannya. Kenyataan ini perlu dikembangkan untuk menumbuhkan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan. Selain itu, pesantren ternyata telah membuka kesempatan belajar bagi kalangan rakyat luas yang

⁹ Suyoto, "Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan," dalam M. Dawan Rahardjo (ed), *pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 61-62.

berbeda dengan lembaga pendidikan lain yang nampak lebih mengutamakan kelompok elit.¹⁰ Namun sampai dekade terakhir ini tidak pesantren yang dikelola secara informal. Informalitas manajerial ini didasari pada asumsi bahwa pesantren sebagai lembaga tradisional tidaklah memerlukan legalitas formal.

Meskipun peranan pesantren yang begitu besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, namun lembaga pendidikan ini masih saja dikategorikan sebagai lembaga pendidikan yang marginal. Saat sekarang inilah klaim marginal itu harus dihapus dengan mengadakan berbagai pembenahan dan inovasi di tubuh pendidikan pesantren. Untuk itu perlu ada improvisasi perkembangan pesantren yang dipilih sendiri oleh kiai atau bersama pembantunya secara intuitif. Untuk melaksanakan usaha ini berarti mutlak memerlukan manajemen yang profesional. Masadepan pesantren sangat ditentukan oleh faktor manajerial. Tuntutan profesionalitas manajerial pesantren karena peta permasalahan kita sangat kompleks yang menyangkut bukan saja masalah teknis pendidikan, tetapi juga meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pendanaan dan efisiensi dari sistem itu sendiri. Maka manajemen pendidikan pesantren harus disesuaikan dengan tuntutan masyarakat supaya pesantren yang telah dipercaya masyarakat tetap eksis. Untuk itu, pengelola pesantren harus memperhatikan aspirasi dan tuntutan masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

¹⁰ *Ibid.*, hal. 76.

Dengan demikian pesantren harus bisa menyediakan sistem pendidikan dan pengajaran yang bisa mengakomodasi materi pendidikan umum sesuai perkembangan iptek untuk memenuhi tuntutan masyarakat tanpa harus meninggalkan materi pokok tentang keagamaan Islam. Sebab materi pokok ke-Islaman inilah yang menjadi ciri pokok dari sistem pendidikan pesantren.

Dalam kaitan inilah penyelenggaraan manajemen pendidikan pesantren memiliki nilai sama pentingnya dengan upaya menjaga estafet kepemimpinan. Untuk itu, seorang kiai harus menguasai ilmu ke-Islaman, mengetahui tugas-tugas manajerial dan hal-hwal keduniawian yang menjadi tuntutan perkembangan zaman.

Untuk itu pola kepemimpinan dalam pesantren selama ini umumnya bercorak alami yang berupa pola pewarisan pesantren, termasuk estafet kepemimpinannya, harus segera dirombak supaya pesantren tidak ditinggalkan masyarakat. Pengembangan pesantren maupun proses pembinaan calon pimpinan yang akan menggantikan pimpinan yang ada harus memiliki bentuk yang teratur dan menetap.

Untuk itu dalam pesantren perlu menerapkan sistem kepemimpinan multi-leaders. Misalnya ada pesantren yang menerapkan pola dua pimpinan, yakni pemimpin urusan luar kepesantrenan dan pimpinan bidang kepesantrenan. Sehingga dalam model kepemimpinan pesantren ini terdapat pimpinan umum yang dipegang oleh seorang kiai dan pimpinan harian yang mengurus kegiatan

praktis mengenai kependidikan dan sebagainya. Namun pengangkatan pemimpin baru ini harus didasarkan pada kemampuan dan dedikasinya terhadap pengembangan pesantren yang dikelolanya, tanpa harus mempertimbangkan faktor hubungan keliarha kiai dan kesederajatan ilmu yang dimiliki sang kiai. Jadi yang diutamakan dalam pengelolaan pesantren adalah kemampuan dan profesionalitas manajerial terhadap sistem pendidikan pesantren. Pola kepemimpinan seperti ini mutlak diperlukan mengingat tidak semua kiai mampu memimpin segala hal selain soal kepesantrenan.

Dengan gejala baru ini, tanpa mengurangi peranan kiai sebagai pemimpin tertinggi sebuah pesantren, maka sistem manajerialnya harus mengarah kepada pola kepemimpinan kolektif, sesuai hirarki kepemimpinan. Dengan model kepemimpinan seperti ini pesantren bisa menjadi salah satu lembaga modern sehingga kelangsungan eksistensi pesantren kemudian tidak lagi bergantung kepada seorang kiai sebagai pemimpin tertinggi secara manunggal. Penerapan pola kepemimpinan kolektif itu bisa menjadikan organisasi kepemimpinan pesantren bisa digerakkan bersama dengan personil kepemimpinan pesantren lainnya. Pola ini juga bisa memaksimalkan kerja personil karena tugasnya terspesifikasi dengan bidangnya, mengingat jenis lembaga pendidikan yang diurusnya bertambah banyak seiring dengan perkembangan zaman yang sesuai tuntutan masyarakat.

Perubahan zaman menuntut perbaharuan sistem pendidikan pesantren. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah pola pikir manusia untuk mengikuti kemajuan tersebut. Maka pesantren dituntut untuk bisa menyediakan lembaga pendidikan sesuai keinginan masyarakat. Namun visi dan misi pesantren untuk mencetak intelektual muslim yang berbudi luhur harus dikedepankan. Sehingga pesantren yang telah lama menjadi lembaga pendidikan ideal tetap bisa eksis karena tidak ditinggalkan masyarakat pengguna jasa pendidikan.

Dalam era otonomi daerah yang memberikan kewenangan penuh pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, dimana masyarakat dan Pemerintah lebih dekat dan bersama-sama dalam menyelenggarakan pembangunan, maka Pemerintah diharapkan mampu secara efektif membaca kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Agar lebih efektif, diharapkan masyarakat, dalam hal ini komunitas Pesantren bisa menjadi salah satu ujung tombak untuk mampu memformulasikan masalah-masalah yang terjadi dan berkembang di masyarakat dan dapat menyampaikannya kepada Pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka paradigma *community driven development* yaitu penciptaan iklim untuk memberi penguatan peran masyarakat untuk ikut dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, ikut menggerakkan atau mensosialisasikan, ikut melaksanakan pembangunan, dan melakukan kontrol publik menjadi sangat signifikan. Hal itu bisa terkait dengan

perencanaan, implementasi, dan keberlanjutan berbagai macam program sesuai dengan permasalahan dan urutan prioritasnya yang melalui proses demokratis, inklusif, dan transparan yang disepakati untuk ditangani bersama. Dengan demikian nantinya pembangunan, khususnya Kimpraswil, diarahkan untuk mampu memperbanyak pilihan-pilihan yang dapat diambil dan dimanfaatkan secara sungguh-sungguh oleh masyarakat.

Kota Balikpapan merupakan kota yang kebanyakan masyarakatnya taat beragama dan sangat memperhatikan pendidikan agama putra-putrinya. Terbukti di Kota Balikpapan terdapat banyak pondok pesantren yang berkembang cukup baik di sana. Di kota Balikpapan terdapat 26 pondok pesantren dengan berbagai tipe. Seluruh pondok pesantren yang ada di kota Balikpapan tersebut menjadi populasi dalam penelitian ini. Sampel dari penelitian ini adalah 12 pondok pesantren. Nama-nama pondok pesantren yang ada di kota Balikpapan disajikan pada tabel 24 berikut ini.

Tabel 24. Rekapitulasi Data Pondok Pesantren Tahun 2009

No.	Nama Pontren	Alamat	Tipe	Nama Pimpinan	Th. Ber diri	Jml. Sant ri	Jml. Usta d
1.	Hidayatu llah	Jl. Mulawarman Teritip Bpp Timur	Komb inasi	H.Abdurrah man Muh	1973	1110	142
2.	Al-Mujahidi n	Jl. Sukarno Hatta Kr.Joang Bpp Utara	Khala fiyah	Drs.H.Rusdi man	1981	516	55
3.	Sabilal	Jl. P. Antasari	Komb	M.Zarkawi,	1986	478	82

No.	Nama Pontren	Alamat	Tipe	Nama Pimpinan	Th. Berdiri	Jml. Santari	Jml. Ustad
	Muhtadin	Kr.Rejo Bpp.Tengah	inasi	S.Ag.			
4.	Asy Syifa	Jl. Sukarno Hatta Bpp Utara	Kombinasi	Abdurrahman Hasan	1986	453	44
5.	Al Banjary	Jl.Sukarno Hatta Km.19,5 Bpp Utara	Salafiyah	K.H.Syarwani Zuhri	1993	495	23
6.	Ruhama	Jl. Prapatan 59 Bpp Selatan	Salafiyah	Abdullah Ghozim	1992	20	6
7.	Subulussalam	Jl.Sukarno Hatta km 4,5 Bpp Utara	Salafiyah	KH. M.Fadli	1993	110	15
8.	Syaichon a Cholil	Jl. Mulawarman Bpp Selatan	Kombinasi	K.H.M.Ali Cholil	1994	335	27
9.	Mardhoti Ilah	Jl. Sukarno Hatta Bpp Utara	Kombinasi	Syahril Yani	1995	84	24
10.	Insan Kamil	Jl.Ksatrian Km.8 Bpp.Utara	Kombinasi	KH.Asnawi Arbain	2000	98	17
11.	Baitul Makmur	Jl.Baitul Makmur Bpp.Timur	Kombinasi	KH.Hasbullah Ismail	1997	72	3
12.	Jamiatul Islamiyah	Kel.Kariangau Bpp Barat	Salafiyah	KH.Asman Lubis	2003	50	10
13.	Al Muttaqin	Jl.S.Parman RT 25 Bpp Barat	Kombinasi	KH.Anas Muchtar	2003	251	27
14.	Tarbiyatul Ummah	Jl. Batu Ampar Km 8 Bpp Utara	Salafiyah	Burhanudin H	2005	50	9
15.	Rahmatu Ilah	Jl.Psr Gn.Tembak Km 8 Bpp Utara	Salafiyah	KH.Djailani HB	2005	12	
16.	Al Izzah	Kr.Joang Bpp Utara	Salafiyah	Muchlasin	2005	25	
17.	Al Mustaqie	Jl.DI.Panjaitan Rt.82 Bpp tengah	Kombinasi	H.Musalam	2006	7	

No.	Nama Pontren	Alamat	Tipe	Nama Pimpinan	Th. Berdiri	Jml. Santori	Jml. Ustad
	m						
18.	Al Hamidiyah	Jl.Sukarno Hatta Km 2 Bpp Utara	Salafiyah	H.Muslih	2006	25	3
19.	Bairuha	Guntur Damai Bpp tengah	Salafiyah	H.Ruslan Efendi	2006	91	11
20.	Miftahul Ulum	Batakan Mas Bpp Timur	Salafiyah	H.Hammari Faiz	2006	51	13
21.	Daruaja	Jl.Mufakat Teritip Bpp Timur	Salafiyah	Bahrudin	2006	23	4
22.	Gema Rahmatullah	Jl.Mulawarman Lamaru Bpp Timur	Salafiyah	Rahmani, S. Ag.	2006	13	2
23.	Nurul Khairat Al Muhibbin	Sepinggan Baru Bpp Selatan	Salafiyah	H.Mahdar	2006	25	25
24.	Mas'ad Al Husein	Jl.Mulawarman Kel.Teritip Bpp timur	Salafiyah	Habib Husein	2007	25	8
25.	Ibnu Qoyyim	Jl.Projakal Kel.Batu Ampar Bpp Utara	Salafiyah	Abu Qarimah Asykari	2001	256	7
26.	Kuliyatul Muballighin	Jl. Km.8 Kr.Joang Bpp Utara	Salafiyah	H.Kusasi	1990	20	32

2. Majelis Ulama Indonesia Balikpapan

Dalam Islam, ulama adalah pemimpin umat. Keberadaan mereka dibutuhkan oleh masyarakat Kota Balikpapan yang penduduknya memeluk Agama Islam. Islam mempunyai konsep bersih yang luas untuk kepentingan ibadah dan kepentingan kebersihan lingkungan. Namun potensi seperti di atas belum banyak menunjang program kebersihan di Kota Balikpapan untuk mewujudkan kota bersih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masalah yang diteliti berkisar pada sejauh mana peranan ulama yang berfungsi sebagai motivator dalam sistem pengelolaan kebersihan, pengetahuannya dalam makna konteks tentang bersih yang mendukung pengetahuan bersih dari konsep Islam. Kemudian bentuk-bentuk aktivitasnya, kondisi kebersihan, dan partisipasi masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia kota Balikpapan juga menjadi sampel dalam penelitian ini. Peran Majelis Ulama Indonesia kota Balikpapan sangat dibutuhkan dalam penerapan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2004 ini, karena Majelis Ulama Indonesia kota Balikpapan merupakan organisasi masyarakat yang masih di dengar petuahnya oleh masyarakat.

C. Peraturan Pemerintah Daerah Tentang Kebersihan

1. Peraturan Pemerintah daerah tentang Kebersihan

a. Dasar Pertimbangan

- 1) bahwa pengelolaan persampahan merupakan bagian integral dari pengelolaan kebersihan Kota Balikpapan.
- 2) bahwa seiring dengan pertumbuhan kota dan penambahan penduduk produksi sampah di wilayah Kota semakin meningkat sehingga memerlukan pengelolaan.
- 3) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Pengelolaan persampahan.

b. Ketentuan

1) Ketentuan Umum

- a) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Balikpapan selaku Badan Legislatif Daerah.
- b) Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan yang bertanggungjaab di bidang persampahan.
- c) Dinas adalah dinas yang bertanggungjawab dibidang persampahan.

- d) Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah. Dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
- e) Penyidik Pegawai Negara Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
- f) Sampah adalah semua jenis buangan /kotoran padat yang berasal dari rumah tempat tinggal, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, restoran, pasar, bangunan umum, pabrik, industri, termasuk puing-puing sisa bahan-bahan bangunan, tebangkan pohon dan besi-besi tua (bekas) kendaraan bermotor dan lainnya yang sejenis.
- g) Pengelolaan persampahan adalah bentuk kegiatan penanganan sampah mulai dari sumber/timbulnya sampah sampai pada sampah tersebut musnah (habis), termasuk kegiatan ikutan lainnya seperti *reduce* (pengurangan volume/jumlahnya), *reuse* (penggunaan kembali), *recycle* (daur ulang atau mengubah wujud dan bentuknya untuk pemanfaatan lainnya).

- h) Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
- i) Bahu jalan adalah bagian dari jalan yang terdapat di pinggir antara batas jalan dengan parit.
- j) Jalur Hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya.
- k) Taman adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
- l) Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- m) Tempat Penampungan Sementara Sampah selanjutnya disingkat TPS adalah sesuatu yang khusus dibuat dan diletakan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum serta mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang dapat menampung sampah minimal 1 (satu) meter kubik sebelum diangkut ke TPA.
- n) Tempat pemusnahan akhir sampah selanjutnya disingkat TPA adalah sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pemusnahan sampah.

o) Gerobak sampah adalah gerobak yang diperuntukkan dalam menunjang kegiatan pemindahan sampah dari penghasil/tempat sampah ke TPS.

p) Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah lahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

2) Penanggungjawab Kebersihan

a) Dinas bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan persampahan di Daerah.

b) Camat bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan persampahan di Kecamatan.

c) Lurah bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan persampahan di Kelurahan.

d) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayahnya masing-masing.

3) Kewajiban dan Larangan

a) Dinas berkewajiban memberikan pelayanan di bidang persampahan di wilayah Daerah.

- b) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penyediaan/pengadaan TPS, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pembersihan drainase sekunder/parit jalan dengan ukuran lebar sampai dengan 1(satu) meter, termasuk penyediaan gerobak sampah pada tempat-tempat tertentu dimana TPS tidak memungkinkan dibangun.
 - c) Camat berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya.
 - d) Lurah berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya.
 - e) Ketua RT bertanggungjawab atas pengoperasian gerobak sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- 4) Kewajiban Masyarakat
- a) Setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya.
 - b) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah.
 - c) Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dibuang ke TPS.
 - d) Pemilik/penghuni rumah tinggal, kantor, dan tempat ibadah serta bangunan/sarana untuk kepentingan umum lainnya, wajib menyediakan tempat penampungan sampah.

- e) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
- f) (f) Setiap industri/pabrik wajib membuang sampahnya langsung ke TPA
- g) Setiap pedagang penjaja wajib menyediakan tempat penampungan sampah.
- h) Penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
- i) Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dibuang ke TPS.
- j) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
- k) Setiap orang atau Badan yang menguasai atau mengelola dan atau menempati suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, perpasaran dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada dilingkungannya dari sampah.
- l) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk penyediaan tempat penampungan sampah dan membuang sampah ke TPS.

- m) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
- n) Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat penampungan sampah di dalam kendaraannya.
- o) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
- p) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, 7,8, dan 9 sekurang-kurangnya memenuhi criteria sebagai berikut: Tertutup, Rapi, dan tidak menyebarkan bau.
- q) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan lingkungan tempat diadakannya keramaian dari sampah dan membuang ke TPA.

2. Pelaksanaan Perda Nomor 10

a. Pendahuluan

Di Balikpapan maslaah persampahan dari tahun ketahun dirasakan semakin kompleks penanggulannya. Hal ini sering dengan masalah perkembangan penduduk Kota Balikpapan pemerintah Kota Balikpapan sebagai penanggungjawab masalah kebersihan kota melihat situasi demikian dan dalam mengahdapi tuntutan permasalahan

kebersihan ke depan, maka partisipasi masyarakat dalam penaggulangan secara bersama-sama mutlak harus dilakukan.

Harapan untuk menciptakan Balikpapan sebagai kota BERIMAN dan menjadikan warga Balikpapan sebagai tuan rumah sendiri, maka langkah membudayakan setiap warga untuk mengetahui, memahami dan menghayati arti pentingnya hidup bersih dan sehat dan dengan membuang sampah secara tepat yakni tepat waktu, tepat cara dan tepat tempatnya adalah suatu langkah yang sangat wajar dan manusiawi, hal tersebut sesuai dengan peraturan daerah kota Balikpapan nomor 10 Tahun 2004 tentang pengelolaan persampahan dan peraturan daerah Balikpapan nomo 23 Tahun 2001 tentang retribusi kebersihan dan persampahan.

Dalam peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2004 telah mengamanatkan kepada seluruh warga kota Balikpapan pada pasal 4 ayat (1) bahwa setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya yang meliputi kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah dan wajib membuangnya ke tempat penampungan sampah sementara (TPS). Serta pasal 13 ayat (1) bahwasebelum dibuang ke TPS terlebih dahulu harus dikemas dengan rapi dan dibuang pada malam hari jam 18.00-06.00 Wita.

Untuk menumbuhkan perilaku, sikap kepatuhan terhadap peraturan daerah tersebut diperlukan pembinaan dan sosialisasi secara terus, konsisten, dan konsekuen, dan diperlukan kepedulian yang tinggi, guna mengembangkan motivasi kesadaran hidup bersih dan sehat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk itu adalah melakukan lomba pengelolaan kebersihan di tingkat Rukun Tetangga sampai dengan tingkat kecamatan, kerja bakti terpadu, ceramah-ceramah, diskusi-diskusi, pemasangan papan hambau di tempat-tempat tertentu dan melaksanakan kerja sama untuk percontohan pengelolaan persampahan pada lokasi atau wilayah tertentu seperti Rukun Tetangga, kelurahan dan kecamatan.

Gagasan dan program yang tertuang dalam buku petunjuk praktis pengelolaan persampahan ini diharapkan mempunyai dampak positif dalam merubah sikap dan perilaku warga masyarakat serta menumbuhkan kepercayaan bahwa mereka pada hakekatnya mampu dan sanggup untuk menciptakan Balikpapan Kota Beriman (Bersih, Indah, AMan dan Nyaman) dengan tekad Balikpapan ***Kubangun Kujaga dan Kubela.***

b. Sistem pengelolaan Persampahan

Didalam upaya menciptakan Balikpapan sebagai Kota Beriman terbebas dari persampahan, maka Pemerintah Kota Balikpapan

menerapkan Sistem/model pengelolaan Persampahan dengan beberapa tahapan yakni.

1) Tahap pengumpulan, pemilihan dan penyimpangan sementara

Pada tahap ini sampah-sampah berasal dari rumah tangga, kantor, pasar, dan tempat-tempat usaha lainnya merupakan tanggung jawab dari tiap persil, selanjutnya sampah-sampah yang telah terkumpul rapi nantinya akan diambil oleh petugas pengambil sampah yang telah ditunjuk sesuai dengan kesepakatan dibawah pengawasan RT.RW setempat untuk dibuang ketempat penampungan sementara (TPS) yang telah ditentukan atau yang terdekat. Pemerintah Daerah pada dasarnya sangat mengharapkan kesadaran warga Kota untuk memilah-milah sampah tersebut diatas, sesuai dengan jenisnya, dimana masing-masing jenisnya dimasukkan kedalam kantong plastic sendiri. Tujuannya disamping membantu mencegah penyebaran penyakit yang dibawa oleh vector, juga mengurangi bau dari sampah tersebut.

Upaya tersebut disamping untuk kepentingan pemilik bangunan itu sendiri, juga membantu para petugas pengangkut yang setiap hari mengambil sampah tanpa perlu adanya pencemaran pada diri mereka dan lingkungan sekitarnya. Demikian juga pengangkutan sampah dari rumah atau persil ke TPS diangkut pada malam hari

(02.00 WIB) agar tidak mengganggu ketenangan warga maupun arus lalu lintas.

2) Tahap Pemindahan dan pengangkutan

Tahapan ini merupakan kelanjutan dari pengumpulan sampah, dimana sampah yang telah terkumpul di TPS (Tempat Penampungan Sampah Sementara) selanjutnya dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang diangkut oleh Dinas kebersihan dengan truk yang menggunakan penutup jarring agar sampah-sampahnya tidak tercecer di jalan dan mengganggu arus lalu lintas.

Berdasarkan perda no.10 tahun 2004 tentang pengelolaan Persampahan Kota Balikpapan Pasal 6 berbunyi “Setiap Industri/Pabrik wajib membuang sampahnya langsung ke TPA”. Dan Pasal 8 (ayat 1) berbunyi “Setiap orang atau badan yang menguasai atau mengelola dan atau menempati suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, perpasaran dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada dilingkungannya dari sampah. (ayat 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) termasuk penyediaan tempat penampungan sampah dan membuang sampah ke TPA. Serta pasal 11 berbunyi “Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan suatu keramaian dari sampah dan membuangnya ke TPA”.

3) Tahap Pemusnahan

Proses tahap terakhir dari pengangkutan/pembuangan sampah di Balikpapan adalah dengan membuang ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) dengan system SANITARY-LANDFILL (diaratakan dan dipadatkan pada tempat terbuka yang telah dilapisi Geomembant kemudian ditutup dengan tanah, yang letaknya jauh dari pemukiman dan sudah dilakukan pengamanan berupa saluran dan kolam air leacheat serta pembatas jalur hijau dan pemagaran).

Pemerintah Kota Balikpapan menyadari sepenuhnya bahwa dengan perkembangan Kota Balikpapan kedepan proses tahap ini tidak optimal lagi karena biaya operasionalnya sangat mahal. Untuk itu salah satu alternative yang paling efisien dan efektif adalah system Power Plant Thermal Converter yang menggunakan system tersebut pertama Tenaga Listrik dapat terpenuhi, kedua sampah habis/tuntas dan ketiga pemerintah Kota dapat fee penjualan tenaga listrik.

3. Kewajiban Pemerintah Dalam Pengelolaan Persampahan

Sebagaimana yang tertuang di dalam Perda No. 10 Tahun 2004 pasal 3 (ayat 1) menyatakan: “Dinas berkewajiban memberikan pelayanan dibidang persampahan di wilayah daerah. (ayat 2). Kewjiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penyediaan/parit jalan dengan ukuran lebar sampai 1 (satu) meter, termasuk penyediaan gerobak sampah pada tempat-tempat

tertentu dimana TPS tidak memungkinkan dibangun. (ayat 3). Camat berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya (ayat 4), Lurah berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya. Dan (ayat 5). Ketua RT berkewajiban mengoperasikan gerobak sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Sejalan dengan usaha-usaha peningkatan kebersihan lingkungan untuk menciptakan Balikpapan Kota BERIMAN diperlukan kemampuan penanganan secara optimal. Dinas Kebersihan sebagai unsure pelaksana operasional yang menangani masalah kebersihan mempunyai kewajiban:

- a. Merencanakan lokasi baru untuk membuat tempat penampungan sampah TPS dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA).
- b. Menyusun rencana kegiatan dibidang kebersihan ssuai dengan program dan skala prioritas yang telah ditetapkan.
- c. Memberikan petunjuk,pedoman teknis kepada masyarakat di bidang kebersihan.
- d. Mengadakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang kebersihan.
- e. Melakukan pengawasan rutin terhadap kebersihan kota.

- f. Mengadakan pengendalian dan pengawasan terhadap fasilitas umum ditempat umum, pabrik/industri, dibidang kebersihan dan limbah yang dihasilkan.
- g. Mengajak kerjasama dengan instansi lain untuk menyelenggarakan kebersihan lingkungan Kota Balikpapan melalui Bina wilayah, lomba kebersihan, kerja bakti, kelurahan percontohan, dan bentuk lainnya.
- h. Mengangkut dan melaksanakan pembersihan sampah-sampah dijalan umum dan selanjutnya dibuag ketempat pembuangan sampah yang telah ditentukan/disediakan.

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa penanganan sampah bukanlah semata-mata merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah saja, namun juga tanggung jawab dari warga masyarakat secara keseluruhan yang sangat dibutuhkan dan diharapkan. Adanya kerja sama dan keterlibatan seluruh warga masyarakat untuk mencapai Balikpapan kota BERIMAN dapat digalang dan dicapai apabila hal ini dilakukan secara berkesinambungan secara teratur.

4. Kewajiban Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

Sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungan (ayat 2). Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah.

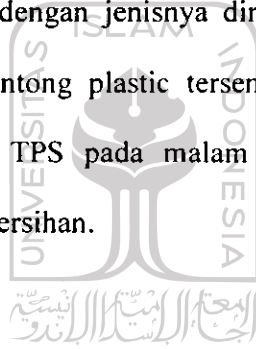
(ayat 3). Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dibuang ke TPS.

Sedangkan pada pasal 5 disebutkan bahwa: (ayat 1). Pemilik/penghuni rumah tinggal, kantor dan tempat ibadah serta bangunan /sarana untuk kepentingan umum lainnya, wajib menyediakan tempat penampungan sampah (ayat 2). Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Oleh karena itu warga masyarakat Kota Balikpapan mempunyai kewajiban yang harus dilakukan antara lain:

- a. Hendaknya tidak membuang sampah disembarang tempat.
- b. Saling menegur apabila mengetahui salah satu anggota masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
- c. Memelihara kebersihan lingkungan (tidak terbatas pada ruang sekitarnya, namun juga harus memelihara kebersihan Kota secara keseluruhan).
- d. memelihara dan memanfaatkan bantuan sarana kebersihan yang pernah diberikan.
- e. Malaporkan secepatnya kepada Pemerintah Daerah Kota Balikpapan (Dinas Kebersihan) apabila mengetahui terdapat sampah-sampah yang tercecer/berserakan di TPS.
- f. Meningkatkan partisipasi untuk memiliki, menyayangi, lingkungan, Kota yang BERIMAN.

- g. Masyarakat diharapkan saling mengawasi kebersihan lingkungan sekitarnya.
- h. Untuk daerah yang padat penduduknya, hendaknya mengupayakan melakukan penghijauan dengan potisasi.
- i. Ketentuan yang belum disebutkan dapat diperoleh melalui musyawarah antar warga.
- j. Memilah-milah sesuai dengan jenisnya dimana masing-masing jenisnya dimasukkan kedalam kantong plastic tersendiri yang diikat dengan rapi kemudian dibuang ke TPS pada malam hari yang selanjutnya akan diangkut dari Dinas kebersihan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

PENDIDIKAN PARTISIPASIF DAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

A. Pendidikan Partisipatif

Manusia memiliki naluri yang bersanding dengan kesadaran. Seorang manusia yang bereksistensi selalu berkepribadian. Tanpa kesadaran, seorang manusia menjadi tidak manusiawi. Seseorang yang manusiawi harus menjadi pencipta sejarahnya sendiri. Dan karena seseorang hidup di dunia dengan orang lain, maka kenyataan “ada bersama” (*being together*) harus dijalani dalam proses “menjadi” (*becoming*) yang tidak pernah selesai. Kondisi ini bukan hanya sekedar adaptasi, tapi proses integrasi untuk menjadi manusia seutuhnya.

Menurut Freire¹², pendidikan harus berorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri. Pengenalan yang dilakukan mencakup kesadaran subyektif dan kemampuan obyektif sebagai sebuah fungsi dialektis yang berlangsung terus-menerus dalam hubungannya dengan kenyataan yang saling bertentangan yang harus dipahami. Hubungan dialektis tersebut tidak berarti mempersoalkan mana yang lebih benar dan yang lebih salah. Oleh karena itu, pendidikan harus melibatkan tiga unsur sekaligus dalam hubungan dialektisnya yang terus-menerus. Tiga hal tersebut adalah: (1) Pengajar; (2) Pelajar atau anak didik; dan (3) Realitas Dunia. Yang

¹² Penyadaran dan Pembebasan: Perkenalan singkat dengan Filsafat Pendidikan Paulo Freire diakses melalui www.rahima.or.id tanggal 20 September 2009.

pertama dan kedua adalah subyek yang sadar (*cognitive*), sementara yang ketiga adalah obyek yang tersadari (*cognizable*). Dalam model pendidikan yang telah mapan selama ini, kondisi dialektis ini tidak terjadi. Dalam model yang mapan, pendidikan menjadi “gaya bank” dimana guru adalah penabung dan murid adalah celengan, anak didik akan menjadi duplikasi guru. Kondisi ini akan melahirkan anak didik yang *Nekrofili* (kecintaan terhadap segala yang tidak memiliki jiwa kehidupan).

Fokus Freire adalah menjadikan pendidikan sebagai kekuatan penyadar dan pembebas bagi umat manusia. Sehingga memungkinkan anak didik menjadi dirinya sendiri yang tersadarkan. Pendidikan harus ditujukan bagi pembebasan dan bukan penguasaan. Untuk itu pendidikan secara metodologis harus bertumpu pada prinsip aksi dan refleksi total, yakni prinsip bertindak untuk merubah kenyataan yang menindas dan secara terus menerus menumbuhkan kesadaran akan realitas dan hasrat untuk merubah kenyataan yang menindas.

Dalam pengertian filosofi pendidikan Freire, proses pendidikan merupakan proses daurulang bertindak dan berpikir yang berlangsung secara terus-menerus sepanjang hidup seseorang. Dengan kata lain, praxis adalah manunggal karsa, kata dan karya, karena manusia adalah kesatuan dari fungsi berpikir, berbicara dan bertindak.

Muhammad Suhaibi¹³ berpendapat bahwa upaya untuk memenuhi dan mencapai substansi dari proses pendidikan yang bernama kebebasan sebagai ganti dari pemberdayaan akan dapat terwujud, karena di sisi yang lain paradigma partisipasi secara langsung maupun tidak memuat semangat kebebasan yang kuat selaligus akan memunculkan sikap meminjam istilah Noercholis Madjid (1999) *“Functioning of Ideals”* yaitu pandangan dasar bahwa belum tentu, dan tidak harus seluruh keinginan atau pikiran seseorang (guru atau murid.) atau kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Persepsi tersebut menunjukkan bahwa idealisme “partisipasi” tiada lain mencerminkan adanya persamaan hak antara satu dengan yang lain, antara guru dengan peserta didik dan antara subyek dengan obyek. Dengan demikian, hakikat pendidikan untuk kembali memanusiakan manusia akan dapat dicapai, karena partisipasi dalam tataran idealnya mengandung muatan makna keleluasaan dan kebebasan dalam memetakan arah belajar. Inilah yang menjadi inti dari proses pembelajaran partisipatif yang pada gilirannya akan dapat melahirkan sikap keterbukaan dan kedewasaan, karena ruang untuk memunculkan inspirasi menjadi mutlak terjadi dan menjadi milik semua.

¹³ Mohammad Suhaidi RB. Memberdayakan Orang Dewasa Melalui Model Pendidikan Partisipatif. Buletin Salam Desember 2003, diakses melalui <http://www.leisa.info> tanggal 18 September 2009.

B. Kesadaran Masyarakat akan Kebersihan

Melihat kondisi kesehatan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, maka perlunya peran aktif semua pihak di dalam masalah kesehatan masyarakat, penyedia layanan kesehatan, masyarakat, pemerintah dan perusahaan perlu menjabarkan peta jalan pengembangan kesehatan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Mengingat wilayah Indonesia sangat luas dengan karakteristik area minyak, gas, pertambangan dan agribisnis baik pertanian, perkebunan dan perikanan, perlunya kerjasama merumuskan dan mengembangkan program kesehatan masyarakat sesuai karakteristik daerah setempat sehingga tahap perubahan menuju masyarakat sehat baik secara sikap, budaya maupun sistem kerja di dalam pengelolaan kesehatan masyarakat menjadi bagian kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan pada akhirnya memiliki *self belonging* bahwa kesehatan merupakan milik dan tanggung jawab bersama dan mampu menimbulkan sanksi sosial bagi anggota masyarakat yang tidak mematuhi.

Dengan memberdayakan semaksimal mungkin organisasi informal masyarakat, kemudian meletakkan dasar-dasar kolaborasi dengan organisasi formal termasuk unsur MUSPIDA setempat, jejaring kesehatan dapat berperan pada saat awal sebagai stimulus pemicu (*trigger*) atau mentor dan meningkat pada tahapan selanjutnya menjadi fasilitator dengan program pendampingan dan kemudian pada saat kemandirian masyarakat sehat terwujud maka peran sebagai narasumber dan pusat pengembangan program komunitas berbasis kesehatan (*community based*

health) melalui jejaring kesehatan dapat menjadi suatu percontohan melalui kerjasama masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah setempat agar dapat dilakukan penyebaran luas cakupan pengembangan kesehatan masyarakat di Indonesia dalam bentuk percepatan kuantitas area cakupan masyarakat dan fokus spesifik kebutuhan program. Program strategis jangka panjang pengembangan kesehatan masyarakat merupakan hasil sinkronisasi program dan target indikator kesehatan nasional dengan kebutuhan dengan memperhatikan tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat setempat terhadap kesehatan.

Program pengembangan sistem kesehatan masyarakat dapat menjadi tanggungjawab bersama dan sejalan dengan regulasi pemerintah pusat dengan peraturan perundangan tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) sehingga dengan kemampuan perencanaan dan analisa kebutuhan yang matang suatu upaya optimalisasi dana dan tenaga melalui mekanisma CSR diharapkan tercapai suatu pemberdayaan dan pengembangan masyarakat diseluruh bidang termasuk bidang kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar didalam menurunkan angka kesakitan dan akhirnya mendukung produktifitas regional dan nasional¹⁴.

Pola penyegaran, pembinaan, pemberdayaan dan penguatan jaringan organisasi Puskesmas, Poskesdes, Posyandu, UKS/UKGS dan PMR sangatlah

¹⁴ Muslim Faisal. *Pengembangan Sistem Kesehatan Masyarakat Indonesia Berbasis Partisipasi Seluruh Masyarakat Menghadapi Era Globalisasi* diakses dari <http://muslimfaisal.wordpress.com/2008/07/17/pengembangan-sistem-kesehatan-masyarakat-indonesia-berbasis-partisipasi-seluruh-masyarakat-menghadapi-era-globalisasi/> tanggal 20 September 2009.

penting didalam mengembangkan sistem kesehatan masyarakat dengan tujuan menuju masyarakat sehat dan sejalan dengan melibatkan masyarakat semaksimal mungkin. Dengan partisipasi semaksimal mungkin dari organisasi aktif yang berada di masyarakat seperti Kader Posyandu, PKK, Taruna Karya, Pramuka, Sarjana Penggerak Pedesaan dan organisasi lainnya serta didukung oleh MUSPIDA setempat. Program kesehatan masyarakat yang merupakan hasil dari sistem kesehatan masyarakat dirasakan sebagai milik bersama karena melibatkan partisipasi masyarakat dan secara simultan edukasi kesadaran masyarakat terhadap kesehatan terus berlangsung secara otomatis sehingga budaya sehat diharapkan menjadi kebiasaan dan kebutuhan pokok masyarakat, disisi lain memberikan sensitifitas masyarakat terhadap deteksi dini masalah gizi, wabah dan tanggap bencana agar koordinasi penanggulangan semakin baik.

Di luar sistem kesehatan masyarakat maka dukungan sistem-sistem lain diantaranya sistem pendidikan sekolah mulai TK sampai dengan SMU sangat berperan edukasi kesehatan bagi siswa khususnya pola hidup bersih dan sehat melalui kurikulum, penyediaan sarana dan ekstrakurikuler sekolah serta peran media tidak kalah pentingnya didalam melakukan perubahan melalui edukasi informasi lebih baik bagi masyarakat. Dengan berkembangnya sistem teknologi telematika melalui luas cakupan fiber optik, maka pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mempercepat proses transformasi sistem kesehatan masyarakat yang terintegrasi agar berdaya guna dan berhasil guna. Pengembangan kompetensi SDM kesehatan yang

memadai dan memahami teknologi digital akan mempermudah proses implementasi sistem kesehatan masyarakat berbasis teknologi yang modern dan memiliki kemampuan mengelola pengetahuan (*knowledge management*) serta mampu mendorong kemandirian yang berkelanjutan (*sustainable development*). Sistem kesehatan masyarakat harus mampu memberikan akses informasi dan layanan mengenai program pengembangan kesehatan masyarakat dan jika semua pihak baik pemerintah setempat, perusahaan, masyarakat termasuk orang tua siswa, sekolah, pusat-pusat layanan kesehatan, media dan semua pihak yang merasa peduli terhadap kesehatan secara bersama-sama maka Indonesia mampu menghadapi tantangan dan siap menuju masyarakat sehat yang kita dambakan bersama.

1. Analisa situasi Sistem Kesehatan Masyarakat

Ketahanan sistem kesehatan masyarakat tidak dapat lepas dari pengaruh sistem yang berada diluar sistem kesehatan masyarakat sendiri. Pengembangan sistem kesehatan masyarakat harus didukung oleh sistem-sistem yang berada diluar sistem kesehatan masyarakat sebagai contoh sistem pendidikan, sistem informasi dan teknologi, sistem keuangan dan lain-lain yang mempunyai dampak pengaruh bagi kesehatan masyarakat. Kondisi awal sistem kesehatan masyarakat saat ini masih dipertanyakan apakah Indonesia memiliki sistem kesehatan masyarakat yang sudah dapat menjamin kesehatan masyarakat dan bagaimana sistem kesehatan masyarakat ini dikembangkan atau berkembang sendiri masing-masing daerah sesuai kebutuhan tanpa suatu kebijakan nasional atau bahkan

regional atau sistem kesehatan masyarakat telah mengalami degradasi peran dan fungsi sehingga tidak lagi bermanfaat bagi masyarakat.

Situasi lingkungan masyarakat yang memberikan dampak negatif bagi kesehatan merupakan tantangan diluar sistem kesehatan masyarakat sebagai contoh wabah penyakit baru seperti flu burung dan HIV/AIDS dimana Indonesia berada sangat dipengaruhi lalu lintas dunia baik arus manusia maupun barang termasuk kandungan makanan dan minuman. Disamping itu, masalah mendasar dengan jumlah penduduk yang besar dengan ciri kepulauan masih perlunya pengawasan terhadap masalah gizi agar tidak terjadi gizi buruk yang sangat ironis dengan sumber daya alam yang kaya. Sistem kesehatan masyarakat yang handal mampu melakukan proteksi diri terhadap bahaya yang mengancam dan memberikan peringatan awal (*early warning sistem*) bagi regional dan nasional agar respon penanggulangan dapat segera diambil tindakan secara cepat. Perkembangan teknologi biologi dan kedokteran mengarah kepada adanya isu-isu internasional mengenai bioterrorism membuat perlunya peranan pemerintah membuat kebijakan dan regulasi terhadap sistem keamanan nasional yang melindungi sistem kesehatan masyarakat nasional yang mencakup sistem kesehatan masyarakat daerah khususnya negara kepulauan yang berbatasan baik udara, darat maupun laut.

Kondisi ideal bahwa sistem kesehatan masyarakat saat ini seharusnya selalu dapat di monitor dan evaluasi agar mampu diperbaiki dan diarahkan

menjadi suatu sistem kesehatan masyarakat nasional yang mampu menjamin kesehatan masyarakat dan selalu mengikuti perkembangan jaman. Pemahaman terhadap sistem kesehatan masyarakat harus dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki kejelasan terhadap faktor lingkungan sistem, faktor masukan sistem, pelaku dan prosedur atau metoda proses sistem, faktor keluaran sistem baik *output* dan *outcome* serta alat ukur umpan balik sistem yang handal. Sistem kesehatan masyarakat bukan sekedar sistem pelayanan kesehatan dari upaya penyembuhan tetapi merupakan suatu sistem yang meliputi fungsi promosi, pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi kesehatan sehingga peranan yang kuat didalam tranformasi budaya sehat menjadi bagian yang penting menuju masyarakat sehat sebagai sasaran utama sistem kesehatan masyarakat. Dengan upaya promosi dan pencegahan terhadap bahaya penyakit, maka sistem kesehatan masyarakat berupaya mengurangi jumlah kesakitan dan biaya kesehatan sekaligus diharapkan meningkatkan produktifitas nasional.

Beban finansial yang besar dikeluarkan setiap tahun dan terus meningkat baik pengeluaran pribadi maupun pemerintah mencapai triliunan rupiah per tahun dapat dihemat dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan yang lebih banyak, merata dan modern di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar masyarakat mampu telah berobat ke luar negeri sehingga menghabiskan dana triliunan rupiah devisa negara dapat dihemat dengan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat yang modern dan canggih. Pengembangan sentra-sentra

kesehatan atau rumah sakit khusus di seluruh Indonesia menjadikan suatu jejaring kesehatan yang berupaya memberikan pelayanan kesehatan terbaik berasal dari kemandirian bangsa. Indonesia akan memasuki era globalisasi dengan perubahan paradigma layanan kesehatan, disisi lain negara-negara lain berbenah dengan pengembangan kesehatan masyarakat berbasis teknologi kesehatan, teknologi informatika dan kompetensi SDM didukung sarana dan prasarana yang modern menjadikan suatu ancaman dan tantangan terhadap kemampuan sistem kesehatan masyarakat nasional didalam menangkap peluang globalisasi atau paling tidak mencegah devisa negara ke luar negeri. Arah pengembangan sistem kesehatan masyarakat yang hanya bersifat pasif dan menyerap biaya kesehatan sangat besar menyebabkan ketidakmampuan sistem kesehatan masyarakat untuk keluar mencari solusi dari berbagai masalah kesehatan masyarakat sehingga menyebabkan sistem kesehatan masyarakat menjadi lemah untuk memperbaiki diri apalagi untuk meningkatkan kemampuan layanan kesehatan karena terjebak terhadap masalah rutinitas fungsi kuratif dan rehabilitatif masyarakat.

Sistem kesehatan masyarakat yang berawal dari kelompok kecil masyarakat pada tingkat RT atau RW dengan posyandu, poskesdes, puskesmas pembantu, puskesmas dan rumah sakit pemerintah dapat menjadi suatu jejaring sistem kesehatan utama yang memiliki rentang pembinaan dari segi pengembangan dan tingkat kolaborasi dengan organisasi informal dan formal masyarakat yang ada, instansi pemerintah terkait dan jejaring layanan kesehatan

swasta agar menjadi suatu sistem kesehatan masyarakat yang terintegrasi. Sistem kesehatan masyarakat posyandu merupakan sistem kesehatan masyarakat yang dimiliki masyarakat seharusnya memiliki pembinaan yang kontinu dari tingkat layanan kesehatan yang menjadi rujukan atau dinas kesehatan setempat sehingga kader posyandu memiliki kemampuan dasar yang memadai didalam pengelolaan posyandu. Kegiatan prosyandu tidak hanya mencakup kegiatan yang bersifat program pemerintah seperti pekan imunisasi tetapi juga kegiatan penyuluhan penyakit dan ceramah pola hidup sehat dan bersih menjadi bagian terpenting didalam mewujudkan budaya masyarakat sehat. Sikap proaktif pelaku didalam sistem kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendorong tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Pemanfaatan lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kamar mandi rumah merupakan awal yang baik sampai dengan pemanfaatan tanaman obat di lingkungan rumah menjadikan suatu upaya kesadaran, pengetahuan serta biaya kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat luas sampai dengan pedesaan dan pesisir pantai. Penyegaran kader posyandu melalui modul pelatihan praktis seperti cara menimbang bayi, materi penyuluhan, cara menyikat gigi yang benar, P3K dan lain-lain diharapkan memberikan dampak pengaruh positif bagi edukasi masyarakat.

Pengaruh sistem lain diluar sistem kesehatan masyarakat yang perlu dibenahi adalah sistem pendidikan dapat berperan didalam menumbuhkan budaya

dan perilaku sehat dan bersih melalui materi pengajaran sesuai kurikulum tambahan, penerapan kegiatan ekstrakurikuler UKS/UKGS melalui dokter kecil membantu siswa berminat masalah kesehatan diri dan menyampaikan kepada orang tua dan lingkungan sekitarnya. Penerapan sistem teknologi informatika melalui JARDIKNAS untuk juga digunakan pada masalah kesehatan memberikan informasi terkini mengenai kesehatan dan permasalahan khususnya masalah praktis dan sehari-hari sebagai contoh demo clip video cara mencuci tangan yang benar dan media yang digunakan merupakan awal budaya sehat bagi anak-anak sejak dini. Teknologi koneksi internet melalui kabel optik membantu menghubungkan seluruh unsur-unsur kesehatan masyarakat mulai dari posyandu atau minimal puskesmas sampai dengan rumah sakit umum daerah dan dinas kesehatan di daerah sampai dengan departemen kesehatan di pusat, teknologi yang ada dapat mempercepat proses komunikasi dan koordinasi serta memberikan peluang bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan yang tidak ada di daerah sebagai contoh proses dokter puskesmas di daerah terpencil dapat bertanya kepada dokter spesialis yang berada di kota-kota besar sehingga kasus-kasus penyakit dapat diberikan opini kedua untuk diagnosis. Pengembangan sistem kesehatan masyarakat didukung pembentukan jaringan kesehatan nasional atau JARKESNAS dengan menggunakan infrastruktur yang sama digunakan oleh JARDIKNAS maka utilisasi sarana dan prasarana kabel optik secara maksimal dapat dioptimalkan bagi kesejahteraan masyarakat khususnya bidang kesehatan.

Proses pemetaan masalah penyakit secara nasional lebih cepat diperoleh dengan penghematan administrasi kesehatan yang menghabiskan dana miliaran rupiah untuk komunikasi dan koordinasi melalui administrasi non digital dibandingkan dengan menggunakan data digital atau media elektronis. Pengembangan sistem kesehatan masyarakat berbasis digital ini pada masa datang menyediakan peluang menciptakan kartu identitas digital yang tidak hanya mencakup masalah kesehatan tetapi juga masalah kependudukan, jaminan sosial, surat ijin mengemudi dan lain-lain (*single number identity*). Dengan keberadaan kartu digital kesehatan, maka kemampuan negara didalam mengolah data dari segi kecepatan dan akuransi sangat tinggi termasuk masalah sensus penduduk dan mengetahui kondisi kesehatan masyarakat pada setiap daerah dan segera mengambil kebijakan dan keputusan secara cepat dan tepat.

Hasil pengembangan sistem kesehatan masyarakat adalah masyarakat yang sehat dengan ukuran sasaran antara didalam mencapai produktivitas nasional. Sasaran antara adalah Indonesia Sehat dengan segala indikator kesehatan yang ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2010. Akibat samping sistem kesehatan masyarakat salah satunya yang terpenting adalah tumbuhnya budaya perilaku sehat dan bersih yang menjadi pondasi masyarakat yang sadar pentingnya menjaga kesehatan. Faktor lingkungan yang diluar kendali masyarakat didalam bidang kesehatan seperti masalah air bersih, makanan bergizi dan polusi udara masih menjadi masalah utama kerentanan kondisi kesehatan masyarakat. Sistem

kesehatan masyarakat seharusnya mampu memberikan garansi kehidupan (*life guarantee*) yang lebih baik sejak anak lahir sampai usia lanjut sesuai yang termaktub didalam undang-undang untuk melindungi warga negara secara optimal. Tidak adanya sistem kesehatan masyarakat menyebabkan ketidakberdayaan negara didalam menjamin masalah kesehatan masyarakat, sehingga menghindari timbulnya persepsi masyarakat bahwa terjadi kondisi negara tanpa negara harus dihindari dengan semakin tumbuhnya sikap kritis dan demokratis masyarakat terhadap pemerintah.

2. Pendekatan Model Sistem Kesehatan Masyarakat

Sebuah pendekatan sistem untuk memodelkan sistem kesehatan masyarakat diperlukan untuk memahami unsur-unsur sistem kesehatan masyarakat dan interaksinya untuk memudahkan pengembangan sistem kesehatan masyarakat yang dimaksud didalam penulisan makalah ini. Suatu model merupakan representasi sederhana dari suatu masalah agar semua pihak dalam memiliki persepsi, pengertian dan pemahaman yang sama didalam mengembangkan sistem kesehatan masyarakat termasuk sumber daya yang dibutuhkan, proses dan interaksi, hasil dan akibat samping termasuk faktor-faktor lingkungan yang perlu diperhatikan agar ketahanan sistem kesehatan masyarakat dapat dipertahankan dan dikembangkan dalam situasi dan kondisi yang semakin tidak pasti dimasa datang.

Suatu hal yang perlu dipahami bahwa sumber daya masa datang yang semakin terbatas dengan berbagai penyakit baru baik karena mutasi maupun akibat kemampuan teknologi biologi serta populasi manusia semakin bertambah yang membutuhkan kesehatan memadai. Oleh karena itu, kemampuan negara yang dituntut mencakup kebutuhan dasar termasuk pendidikan, kesehatan, pangan dan papan menjadi pendorong agar sistem kesehatan masyarakat dapat diintegrasikan kedalam sistem sosial dan perilaku masyarakat sehingga beban negara tidak terlalu besar. Masalah yang sangat dominan bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah besarnya pengaruh faktor lingkungan sistem termasuk pengaruh arus liberalisasi dan investasi asing, kebijakan nasional, sistem diluar sistem kesehatan masyarakat dan perilaku masyarakat yang harus dilakukan pengaturan dan pembenahan bersamaan dengan pengembangan sistem kesehatan masyarakat yang handal.

Salah satu rentannya sistem kesehatan masyarakat menjadi tidak berdaya karena pola kebijakan nasional dan perilaku masyarakat. Sebagai contoh masalah industrialisasi yang terpusat di Pulau Jawa memicu urbanisasi dengan berbagai masalah sosial termasuk masalah kesehatan, sedangkan karakteristik kepulauan/*archipelago* Indonesia memiliki keunggulan generik yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain untuk dioptimalkan didalam memasuki era globalisasi. Penyebaran industri sesuai potensi daerah dapat membantu perkembangan ekonomi regional mengurangi masalah sosial, urbanisasi dan kesehatan sehingga

sistem kesehatan masyarakat baik regional dan nasional dapat saling menunjang didalam mencapai kesehatan masyarakat yang terkendali bukan suatu sistem kesehatan masyarakat yang tidak stabil sehingga lepas kendali menjadi bom waktu bagi penduduk sekitarnya. Urbanisasi dengan berbagai pemukiman di bantaran sungai suatu masalah klasik yang menyebabkan tidak efektifnya fungsi dan peran sistem kesehatan masyarakat merupakan bom waktu wabah penyakit dan berbagai masalah kesehatan karena lemahnya atau bahkan tidak adanya sistem kesehatan masyarakat.

Sistem kesehatan masyarakat tidak mampu berdiri sendiri menghadapi berbagai masalah kesehatan masyarakat perlu perilaku dan partisipasi masyarakat yang sadar bahwa masalah kesehatan merupakan tanggung jawab bersama diawali dari yang sederhana dan dapat dilakukan dimulai oleh setiap individu, keluarga, RT, RW, Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Propinsi dan akhirnya seluruh rakyat. Sebagai contoh perilaku masyarakat didalam membuang sampah pada tempatnya merupakan upaya sederhana tetapi memberikan efek penghematan anggaran luar biasa bagi petugas kebersihan dan usaha pencegahan penyebaran penyakit, banjir dan masalah sosial lainnya. Namun sayangnya pemahaman terhadap sampah masih relatif terbatas, begitu banyak sungai menjadi korban terhadap buangan sampah yang menyebabkan banjir, penyakit termasuk hilangnya keindahan suatu daerah sungai. Pemikiran bahaya sampah terhadap kesehatan menghasilkan perlunya pengolahan sampah menjadi bahan yang produktif

ternyata masih belum menjadi kebijakan daerah secara nasional pada umumnya ditumpuk menjadi gunung sampah yang akhirnya terjadi kasus runtuh menimpa rumah penduduk karena lokasi pemukiman yang berdekatan dengan tempat pembuangan sampah akhir (TPA).

Arus liberalisasi investasi tanpa wawasan lingkungan dan kesehatan masyarakat karena lemahnya kebijakan nasional dapat menghalalkan hancurnya komunitas penduduk dan menimbulkan dampak berbagai masalah kesehatan, sebagai contoh eksplorasi sumberdaya alam yang berdekatan dengan bendungan air maupun pemukiman penduduk menyebabkan kerawanan dan bencana yang pada akhirnya hancurnya sistem kesehatan masyarakat. Untuk itu, perlunya suatu regulasi yang menjamin dan mengatur bahwa setiap implementasi pembangunan/investasi di masyarakat tidak menimbulkan eksese berbahaya bagi hancurnya sistem kesehatan masyarakat termasuk kondisi lingkungan yang sehat dan sikap disiplin masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat membahayakan masyarakat sendiri. Suatu tantangan menghadapi arus globalisasi yang didalamnya terdapat muatan liberalisasi dan kapitalisme bahwa pemerintah pada tingkat lokal dan nasional harus selalu bersikap waspada dan bijaksana didalam pemanfaatan sumberdaya alam negara yang merupakan tabungan investasi generasi berikutnya agar berwawasan lingkungan dan kesehatan sehingga memiliki manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Investasi yang diharapkan negara dan masyarakat adalah investasi yang memberikan nilai

tambah besar bukan prioritas kepada investasi yang hanya mengeksplorasi sumberdaya alam semata, investasi yang hanya menitikberatkan pasar nasional yang besar, investasi yang memanfaatkan penduduk sebagai perakit semata, investasi yang hanya berdampak pada penguatan sektor jasa dll tetapi investasi yang mampu memberdayakan potensi masyarakat dalam jangka panjang yang memiliki kontribusi terhadap proses *transfer of knowhow*, *transfer of technology* dan *transfer of knowledge* sebagai contoh industri manufaktur. Jika masyarakat didalam jangka panjang tidak diberdayakan maka dapat dipastikan bahwa sistem kesehatan masyarakat didalam jangka panjang akan hilang peran dan fungsinya di masyarakat. Pada tataran makro, kebijakan ekonomi makro yang menitik-beratkan hanya pada parameter ekonomi seperti korelasi rupiah dengan mata uang asing dan mengabaikan penguatan sektor mikro menyebabkan rentannya keputusan kebijakan ekonomi terhadap mata uang yang bersifat jangka pendek/spekulatif dibandingkan penguatan industri berbasis manufaktur yang memiliki kemampuan fundamental jangka panjang bagi ekonomi negara. Kemampuan ekonomi sebagai wujud kemandirian bangsa merupakan salah satu faktor dominan kontribusi keberhasilan sistem kesehatan masyarakat khususnya di negara berkembang dimana ketergantungan masyarakat terhadap negara masih tinggi. Kemampuan memahami potensi diri bangsa adalah modal kuat didalam mengembangkan sistem yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik bangsa sendiri.

Sebagai ilustrasi model sederhana sistem kesehatan masyarakat agar pemahaman terhadap pengembangan sistem kesehatan masyarakat dapat dipandang dari segi kajian internal dan lingkungan sistem diuraikan berikut. Pada gambaran proses internal-horisontal sistem kesehatan masyarakat terlihat peran dan fungsi masing-masing pelayanan kesehatan sebagai tidak hanya rantai proses rujukan (*referral sistem*) tetapi merupakan proses tanggung jawab pembinaan bagi tingkat pelayanan dibawahnya sehingga tidak hanya tanggung jawab dinas kesehatan didalam melakukan pembinaan yang lebih banyak dari segi regulasi dan program pemerintah tetapi pelayanan kesehatan diatasnya dapat membina dari segi kasus-kasus medis sehingga proses penyegaran keilmuan dan pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan. Sebagai contoh puskesmas perlu membina posyandu yang mencakup seluruh faktor utama kesehatan baik segi upaya promosi, pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi bagi pasien sesuai dengan ruang lingkup pelayanan dibawahnya.

Tingkat pembinaan dan diharapkan dimasa datang mampu memberikan pengendalian ditunjukkan dari proses internal-vertikal yang mana suatu propinsi bertanggung jawab kepada seluruh sistem pelayanan kesehatan masyarakat mulai dari RS Pemerintah di tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota sampai dengan posyandu sebagai unit terkecil layanan kesehatan. Sedangkan proses internal-vertikal yang melibatkan sistem penunjang seperti SD, SMP/SMU, Masyarakat, Perusahaan dan Pelayanan Kesehatan Swasta merupakan mitra sistem kesehatan

masyarakat yang saling menunjang dan melengkapi agar sistem kesehatan masyarakat menjadi bagian partisipasi maksimal siswa, masyarakat dan perusahaan yang berhubungan dengan semua tingkatan layanan kesehatan baik posyandu sampai dengan rumah sakit pemerintah.

Peran perusahaan yang dilaksanakan humas atau fungsi yang membidangi kerjasama masyarakat di perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan dapat membantu upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit sampai dengan membantu melaksanakan pemetaan penyakit suatu daerah bekerjasama dengan pelayanan kesehatan. Perlunya partisipasi perusahaan didalam sistem kesehatan masyarakat akan memberikan persepsi positif bagi masyarakat setempat dan sekaligus memperkuat sistem kesehatan masyarakat dalam hal upaya promosi dan pencegahan dalam bidang kesehatan.

Dukungan layanan kesehatan swasta dibutuhkan untuk menerima proses rujukan yang mana memiliki sarana dan prasarana layanan kesehatan yang lebih lengkap termasuk tenaga medis atau spesialis/sentra kesehatan khususnya rumah-rumah sakit khusus. Pelayanan kesehatan swasta yang memiliki sentra keunggulan kesehatan bersama perusahaan dapat membantu pelayanan kesehatan melalui program tanggung jawab sosial dan pengembangan komunitas mulai dari posyandu sampai dengan rumah sakit pemerintah di tingkat kota/kabupaten dan propinsi.

Faktor lingkungan sistem kesehatan masyarakat sangat mempengaruhi ketahanan sistem kesehatan masyarakat dalam kemampuan bertahan dan berkembang dalam situasi ketidakpastian lingkungan. Sebagai suatu kebutuhan pokok selain ekonomi, pendidikan, pangan dan sandang, kesehatan merupakan kebutuhan warga negara yang harus mendapatkan perlindungan meliputi semua lapisan masyarakat. Tentunya masalah kesehatan selalu dihadapi setiap saat, tidak ada kondisi sempurna masyarakat bahwa dalam keadaan sehat secara keseluruhan tetapi kondisi dimana dibutuhkan pelayanan kesehatan maka masyarakat dapat melakukan pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan pada saat tersebut secara memadai adalah suatu hal penting didalam mencapai masyarakat sehat, disisi lain kemampuan mendeteksi lingkungan yang membahayakan sistem kesehatan masyarakat sangat diperlukan dimana peran semua pihak termasuk masyarakat, layanan kesehatan, pemerintah dan perusahaan berkerjasama dan memiliki tanggung jawab sama didalam masalah kesehatan masyarakat.

C. Pembangunan Masyarakat Madani

Al-Qur'an kitab suci umat Islam, sekalipun tidak memberikan petunjuk langsung tentang suatu bentuk msyarakat yang dicita-citakan di masa mendatang, namun tetap memberikan petunjuk mengenai cirri-ciri dan kualitas suatu masyarakat yang baik, walaupun semua itu memerlukan upaya interpretasi dan pengembangan pemikiran. Di samping itu l-Qur'an juga memerintahkn kepada umat manusia untuk

memikirkan pembentukan suatu masyarakat dengan kualitas-kualitas tertentu. Dan sangat mungkin bagi umat Islam untuk merekonstruksikan suatu gambaran masyarakat ideal berdasarkan Al-Qur'an.¹⁵

1. Isyarat Al-Qur'an Mengenai Masyarakat Madani

Ada beberapa *term* yang dipakai Al-Qur'an yang menunjukkan arti masyarakat utama, antara lain: *ummat wāḥidah*, *ummat wasaṭa*, *khairu ummat*. Berikut penjelasan dari arti masyarakat utama tersebut.

a. *ummat wāḥidah*

Kata ini berulang kali terdapat dalam al-Qur'an, yaitu: dalam al-Baqarah/2:213, al-Maidah/5:48, Yunus/10:19, Hud/11:118, al-nbiya/21:92 dan lain sebagainya. Bahwa pada mulanya manusia itu adalah umat yang satu, seperti yang ditegaskan dalam ayat:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزِلَ
مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ
فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٣٠﴾

¹⁵ Said Agil Husin Al-Munwar. Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki. (Jakarta: Ciputat Press, 2002: hal 233).

Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi Keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang Telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, Karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.

Kenyataannya manusia tidak mengetahui sepenuhnya bagaimana cara memperoleh kemaslahatan, cara mengatur hubungan antar mereka, atau menyelesaikan perelisihan mereka. Di sisi lain, manusia memiliki sifat egoisme yang dapat muncul sewaktu-waktu, sehingga dapat menimbulkan perselisihan. Karena Allah Swt mengutus para nabi untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan Allah dan menyampaikan petunjuk-Nya dan menugaskan para Nabi itu menjadi pemberi kabar gembira bagi yang mengikuti petunjuk. Hal ini diperkuat dengan ayat:

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ

لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٠٠﴾

Manusia dahulunya hanyalah satu umat, Kemudian mereka berselisih, kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi Keputusan di antara mereka, tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Sungguhpun demikian, agaknya Allah memang tidak menghendaki adanya persatuan mutlak di antara manusia, sebab ada maksud tertentu dibalik perbedaan itu, seperti dijelaskan dalam ayat:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٨٠﴾

Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu.

Kedatangan Islam yang al-qur'an sebagai kitab sucinya, selain mengembalikan bangsa yang terpecah kepada kepercayaan yang murni atau hanif dalam arti sesuai dengan fitrah kejadian manusia yang paling primordial juga mengandung misi mempersatukan individu-individu dalam

kesatuan masyarakat yang lebih besar yang disebut dengan ummah wahidah, yaitu suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Namun, umat tersebut tidak terbatas kepada bangsa adi mana mereka merupakan bagain. Arti ummat mencakup pula seluruh ummat manusia. Dalam hal ini, seluruh bangsa adalah bagian dari ummat yang satu. Dengan demikian, maka kesatuan masyarakat didasarkan pada doktrin kesatuan ummat manusia.¹⁶

b. Ummat Wasata

Istilah ummat bagi kelompok masyarakat Islam dilengkapi dengan istilah “*ummat wasata*” seperti tertuang dalam firman Allah:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٤﴾

Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang Telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-

¹⁶ Said Agil Husin Al-Munwar. Al-Qur'an....hal. 236.

nyiaikan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa kualifikasi ummat yang baik adalah ummat wasatha. Secara harfiah, wasatha berarti pertengahan atau moderat yang memang menunjuk pada pengertian adil. Sehingga ummat wasatha adalah ummat moderat, yang posisinya berada di tengah, agar dilihat oleh semua pihak dan dari segenap penjuru.

Posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan kanan, hal mana mengantar manusia berlaku adil. Posisi itu juga menjadikannya dapat menyaksikan siapapun dan di manapun. Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar menjadi saksi atas perbuatan manusia yakni ummat yang lain.

Muhammad Qutb menampilkan sisi lain dari istilah *wasata* atau berada di tengah dua sisi ekstrim, kapitalitas dan komunisme. Ia mengemukakan bahwa jika kita memperhatikan tiga sistem kehidupan yang diperjuangkan dewasa ini sistem kapitalisme, sistem komunisme dan Islam, maka kita dapat menjumpai bahwa dalam hal sistem ekonominya, yang berkenaan dengan hak milik pribadi, misalnya, ada korelasi yang erat dengan konsep kemasyarakatan. Sistem kapitalis didirikan di atas konsep bahwa individu adalah suatu makhluk suci yang hak-haknya tidak boleh diganggu gugat oleh masyarakat atau tidak boleh dihalang-halangi kebebasannya. Oleh karena itu dalam sistem

kapitalisme ini milik pribadi diizinkan tanpa ada pembatasan apapun. Sebaliknya, sistem komunisme berdasarkan konsepnya atas landasan bahwa masyarakat itu adalah dianggap tidak mempunyai kebebasan apapun. Oleh karenanya, komunisme meletakkan seluruh hak milik pribadi berada di dalam kekuasaan Negara sebagai wakil masyarakat dan hak milik individu tidak diakui.

Kedua konsep ini “kapitalis dan komunis” berlainan dengan konsepsi yang dimiliki Islam, demikian Qutb mengatakan, individu itu serentak mempunyai dua sifat dalam waktu yang bersamaan, yaitu, memiliki sifat sebagai individu yang bebas dan memiliki sifat sebagai salah satu anggota masyarakat. Walaupun kadang-kadang kecenderungan kepada sifat yang lainnya, pada akhirnya ia harus memberikan jawaban yang sama dan seimbang kepada kedua sifat tersebut.

Dalam Konsep kemasyarakatannya yang didasarkan atas teori tadi, Islam tidak memisahkan individu dengan masyarakat dan tidak pula mempertentangkan antara keduanya. Kedua watak yang dimiliki individu yakni sebagai pribadi yang bebas dan sebagai anggota masyarakat itu telah diatur oleh syariat Islam agar memiliki keseimbangan di antara kedua watak tersebut: kepentingan individu terlindungi dan kepentingan masyarakat tetap terpelihara.

Dengan demikian, masyarakat Islam adalah masyarakat harmonis atau masyarakat yang berkeeseimbangan. Barangkali inilah sisi lain dari konsep tentang ummah wasa'at. Jadi boleh dikatakan bahwa ciri keunggulan ummat Islam atau masyarakat Islam itu adalah sifatnya yang moderat dan berdiri di tengah-tengah. Kemudian timbul pertanyaan, apakah pernah ada ummat atau masyarakat dengan kualifikasi seperti tersebut di atas? Jawabannya antara lain dapat ditemukan dalam ayat:

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿٥١﴾

Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan.

Ayat tersebut memberikan penjelasan mengenai visibilitas terbentuknya suatu masyarakat yang dipimpin oleh atau berdasarkan kebenaran dan dengan dasar itu dapat ditegakkan keadilan.

Lebih konkrit lagi, dalam al-A'raf / 7 : 159 disebutkan, bahwa memang ada dalam sejarah suatu ummat yang unggul yakni terdapat di antara ummat Nabi Musa:

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾

Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan hak dan dengan yang hak Itulah mereka menjalankan keadilan.

Dengan demikian, karakteristik utama masyarakat Islam sebagai ummat wasatha adalah dalam hal kemoderatan, watak pertengahan dan keadilan yang harus dibangun masyarakat.

Ummat *wasata* adalah ummat moderat yang posisinya berada di tengah agar dilihat oleh semua pihak dan dari segenap penjuru. Mereka dijadikan demikian sesuai dengan lanjutan al-Baqarah/2:143 di atas, agar mereka menjadi saksi (*syuhada*), sekaligus menjadi teladan dan patron bagi yang lain, dan pada saat yang sama mereka menjadikan Nabi Muhammad Saw, sebagai patron teladan dan saksi pembenaran bagi semua aktivitasnya.

Keberadaan ummat Islam pada posisi tengah menyebabkan mereka tidak seperti ummat yang hanya hanyut oleh materialisme dan tidak pula menghantarkannya membubung tinggi ke alam ruhani, sehingga tidak lagi berpijak di umi. Posisi tengah menjadikan mereka mampu memadukan aspek ruhani dan jasmani material dan spiritual dalam segala aktivitas.¹⁷

c. *Khairu Ummat*

Istilah *khairu ummah* yang berarti ummat terbaik atau ummat unggul hanya sekali saja disebut di antara 64 kata ummat yang terdapat dalam al-Qur'an yakni dalam ayat:

¹⁷ Said Agil Husin Al-Munwar. Al-Qur'an..., hal: 239.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٣٠﴾

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Muhammad Ali, sebagaimana para ahli tafsir pda umumnya, menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ummat pilihan itu adalah kaum muslimin. Dari penafsiran itu timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan kaum muslimin atau umat Islam itu adalah kaum muslimin sepanjang masa atau hanya mereka yang hidup pada zaman Rasulullah Saw.

Penjelasan dari pertanyaan tersebut bias dimulai dari penjelasan kebahasaan. Kata "kuntum" yng digunakan dalam ayat di atas ada yang memhaminya sebagai kata kerja yang sempurna (*kāna tāmmah*) sehingga diartikan (wujud) yakni (kaum wujud dalam keadaan sebaik-baik umat). Ada juga yang memahaminya dalam arti kata kerja yang tidak sempurna (*kāna nāqishah*) dan dengan demikian ia mengandung makna wujudnya sesuatu pada masa lampau tanpa diketahui kapan itu terjadi, dan tidak juga mengandung isyarat bahwa dia pernah tidak ada atau suatu ketika akan

tiada. Jika demikian, maka ayat ini bearti “kamu dahulu dalam ilmu Allah adalah sebaik-baik ummat”.

Sebenarnya dengan mencermati ayat-ayat di atas, bias ditarik definisi *khairu ummah* dengan melihat kriteria yang disebutkan di dalamnya. Kriteria yang disebutkan dalam ayat tersebut di atas adalah pertama, menyuruh kepada kebaikan, kedua, mencegah dari yang buruk dan ketiga, beriman kepada Allah.

Jika memperhtikan ayat itu pula, akan dapat diketahui bahwa al-Qur'an sebenarnya hanya memberikan ciri-ciri yang digambarkan sebagai tugas dari fungsi-fungsi organik masyarakat tersebut, bukannya gambaran kongkrit tentang wujud msyarakat tersebut. Kemudian jika kita mengacu kepada kriteria di atas, maka kita akan mengacu pula kepada kita sebuah ayat lain:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.

Dari ayat di atas, dapat diperoleh kata kunci yang dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan *khairu ummah*, yaitu pertama, *al-khairu* yang secara harfiah diterjemahkan dengan kebajikan. Dalam

berbagai ayat al-Qur'an dan hadis, *al-khairu* bisa berarti kekayaan atau juga kemakmuran. Dalam al-Baqarah (2): 269, *al-khairu* itu adalah hikmah atau ilmu pengetahuan.

Istilah kedua, yang menjadi sangat populer dan sering dijadikan jargon politik adalah apa yang kemudian dirumuskan sebagai "*amar makrūf nahi munkar*". Istilah itu sekarang memiliki arti khusus, misalnya, jika sedang berjuang melawan perjudian, korupsi, kolusi dan nepotisme atau narkoba, maka kegiatan itu dipersiapkan sebagai bentuk atau perwujudan dari *amar makrūf nahi munkar*. *Amar makrūf* tidak bisa dipisahkan dari *nahi munkar*. Artinya, dalam perbuatan *amar makrūf* terdapat pengertian mencegah yang munkar. Jika kebaikan ditegakkan, maka dengan sendirinya, yang buruk dapat dicegah. Demikian pula sebaliknya, dalam pengertian *nahi munkar* mencakup pengertian *amar makrūf*, karena mencegah kejahatan adalah termasuk ke dalam perbuatan baik.

Al-Qur'an sebenarnya telah memberi penjelasan *khairu ummah* yang dimaksud, yaitu kumpulan orang yang memiliki kesamaan budaya. Budaya itu ialah orientasi kepada *al-khair*, memiliki mekanisme *amar makrūf nahi munkar*, aturan tatanan atau pemerintahan yang adil dan beriman kepada Allah.

Jadi, *khairu ummah* dalam pengertian di atas adalah bentuk ideal masyarakat Islam yang identitasnya adalah integritas keimanan, komitmen kontribusi positif kepada kemanusiaan secara universal dan loyalitas pada kebenaran dengan aksi amar makruf nahi munkar sebagaimana dideklarasikan oleh Allah dalam Ali Imran (3): 104 dan 110 di atas.

Prinsip-prinsip dasar *khairu ummat* itu pernah dirumuskan oleh Jam'iyyah Nahdlatul Ulama dalam Muktamarnya ke XIII tahun 1935 dalam rangka mengobati kelemahan umat dan mengembangkan kekuatan social-ekonominya. Rumusan tersebut akhirnya terdiri dari lima butir dan diberi nama Mabadi' Khairu Ummat, yaitu¹⁸:

(1) *Aş-Sidiq*

Aş-Sidiq ialah kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan. Kejujuran adalah satunya kata dan perbuatan, ucapan dan pikiran. Jujur dalam hal ini berarti tidak bersikap plin-plan, tidak memutarbalikkan fakta.

(2) *Al-Amanah Wal wafa' bil 'Abid*

Amanah meliputi semua beban yang harus dilaksanakan baik ada perjanjian atau tidak. Sedang *al-wafa bil 'abdi* hanya berkaitan dengan perjanjian. Gabungan kedua istilah tersebut berarti dapat dipercaya setia dan tepat janji.

¹⁸ Said Agil Husin Al-Munwar. *Al-Qur'an...*, hal. 242.

(3) *Al-'Adalah*

Bersikap adil (*al-adalah*) mengandung pengertian obyektif, proporsional dan taat asas. Butir ini mengharuskan orang berpegang kepada kebenaran obyektif dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.

(4) *At-Ta'āwun*

At-Ta'āwun merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Pengertian *at-ta'āwun* meliputi tolong-menolong setia kawan dan gotong-royong dalam kebaikan dan takwa.

(5) *Al-Istiqāmah*

Istilah ini mengandung pengertian *ajeg-ajeg*, berkesinambungan dan berkelanjutan. *Ajeg-ajeg* artinya tetap dan tidak bergeser dari jalur (*thāriqoh*) sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Dan Rasul-Nya, terutama yang diberikan oleh *salaf al-ṣalīh* dan aturan-aturan yang disepakati bersama.

(6) *Baldat Ṭayyibah*

Istilah ini hanya terulang sekali dalam al-Qur'an, yaitu dalam ayat sebagaimana berikut ini;

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas tentang kriteria dan gambaran dari negeri yang baik (*balad taysyibah*), namun demikian dari penyelidikan ayat-ayat yang berbicara tentang sejarah kerajaan Saba' ada beberapa poin penting, yaitu:

- (a) Pertama, musyawarah; hal ini bias dilihat dari sikap ratu Bilqis, sebagai penguasa kerajaan Saba' yang selalu meminta pendapat terhadap bawahannya apabila ingin memutuskan suatu persoalan yang penting. Hal ini bias dilihat dari penuturan ayat:

قَالَتْ يَتَايَأُ آلِمَلُؤُا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ

تَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾

Berkata dia (Balqis): "Hai para pembesar berilah Aku pertimbangan dalam urusanku (ini) Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)".

- (b) Kedua, Anti kekerasan. Hal ini bias dilihat dari tanggapan Ratu Bilqis terhadap usul yang diajukan bawahannya, untuk mengirim pasukan perang guna menyerang kerajaan Sulaiman. Usul tersebut ditanggapi dengan menyatakan bahwa:

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً
وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٦٨﴾

Dia berkata: "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat.

Dari pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa ratu ini sangat anti kekerasan.

2. Karakteristik Lain Masyarakat Madani

Masyarakat utama yng dikehendaki al-Qur'an mempunyai karakteristik-karakteristik sebagai berikut¹⁹:

- a. Ketaatan kepada Allah (Ummat Muslimah)

Masyarakat Islam yang berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 128 adalah masyarakat yang secara totalitas patuh dan tunduk kepada Allah. Kepatuhan dan ketundukan kepada Allah tersebut

¹⁹ Said Agil Husin Al-Munwar. Al-Qur'an..., hal. 244.

mengharuskan mentaati segala perintahNya, baik yang menyangkut keagamaan atau pun kemasyarakatan. Hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya yang termuat dalam Al-Qur'an dan hadis berfungsi untuk mengatur masyarakat dan kepatuhan bagi suatu masyarakat untuk bergerak sekaligus menghadapi tantangan.

b. Persaudaraan (*Ukhuwwah*)

Persaudaraan antara sesama muslim atau persaudaraan seagama berdasarkan firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٩٩﴾

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Persaudaraan yang dimaksud dalam ayat ini adalah persaudaraan berdasarkan agama. Oleh karena itu, jika terjadi konflik internal orang-orang beriman seperti yang dicontohkan pada ayat sebelumnya, maka hendaklah didamaikan antara mereka. Tidak dibenarkan di antara orang-orang beriman terjadi pertengkaran, perselisihan, pembunuhan dan penindasan, serta membedakan atau mengistimewakan sebagian atas sebagian yang lain.

Ayat-ayat dalam surat al-Hujarat ini menggambarkan dua metode menciptakan persaudaraan antara orang-orang beriman. Pertama, jika

terjadi konflik antara orang-orang beriman maka harus diselesaikan dengan adil. Sedangkan kedua adalah tindakan preventif, yakni bersifat pencegahan hal-hal yang dapat menimbulkan potensi konflik, seperti larangan menghina, menggunjing, memperolok-olok, dan berprasangka buruk. Inilah keindahan al-Qur'an dalam membenahi masyarakat.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Data Hasil Angket untuk Pondok Pesantren

Untuk mengungkap partisipasi Pondok Pesantren di kota Balikpapan terhadap Perda No. 10 Tahun 2004 tentang Kebersihan Lingkungan Kota Balikpapan, maka diberikan angket yang berisi 20 pertanyaan kepada 12 pondok pesantren yang ada di kota Balikpapan. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap Organisasi Masyarakat Islam kota Balikpapan disajikan pada tabel 26 berikut ini:

Tabel 26. Hasil Penelitian Angket terhadap Pondok Pesantren

No.	Pertanyaan	Prosentase Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1.	Apakah kegiatan membersihkan lingkungan pondok (selanjutnya disebut kerja bakti saja), dilakukan secara rutin ?	100%	
2.	Adakah anggaran khusus Pondok Pesantren untuk kegiatan kerja bakti?	42%	58%
3.	Apakah kegiatan kerjabakti biasanya diikuti oleh semua santri yang ada di pondok pesantren?	100%	
4.	Apakah kegiatan kerjabakti biasanya juga melibatkan pengurus pondok pesantren?	83%	17%
5.	Apakah kegiatan kerjabakti juga dilakukan disekitar dan diluar area pondok pesantren?	92%	8%

No.	Pertanyaan	Prosentase Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
6.	Siapakah yang biasanya menggerakkan kerja bakti di pondok pesantren? (Jawaban bisa lebih dari satu, mohon disebutkan)		
7.	Apakah pondok pesantren ini memiliki tempat pembuangan sampah pada masing-masing kelas/asrama?	75%	25%
8.	Apakah di lingkungan pondok pesantren, ada semacam media informasi (majalah dinding atau yang lain) untuk menambah pengetahuan warga pondok tentang kebersihan lingkungan ?	83%	17%
9.	Apakah di lingkungan pondok pesantren ada petugas kebersihan yang rutin mengangkut dan membuang sampah ?	67%	33%
10.	Apakah pondok pesantren ini memiliki sarana pembuangan sampah sementara ?	92%	8%
11.	Apakah di lingkungan pondok pesantren ini memiliki sarana tempat pemindahan sampah? (seperti: TPS, Transfer Depo, Transfer Station)	50%	50%
12.	Apakah di lingkungan Pondok pesantren ini memiliki gerobak sampah ?	92%	8%
13.	Apakah di lingkungan pondok pesantren ini mempunyai perencanaan menyeluruh mengenai pengelolaan kebersihan lingkungan?	67%	33%
14.	Apakah dalam pengelolaan kebersihan/sampah di pondok pesantren ini melibatkan pihak ketiga/pihak luar?	8%	92%
15.	Apakah pondok pesantren ini sudah pernah mendapatkan penyuluhan mengenai kebersihan/persampahan ?	42%	58%

No.	Pertanyaan	Prosentase Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
16.	Apakah di lingkungan pondok pesantren ini terdapat banyak pepohonan atau tanaman?	67%	33%
17.	Apakah pondok pesantren ini memiliki penganggaran untuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	25%	75%
18.	Apakah pondok pesantren ini memiliki visi dan misi tentang kebersihan lingkungan yang sesuai dengan visi misi pembangunan daerah kota Balikpapan?	58%	42%
19.	Apakah pondok pesantren ini telah mendapatkan penyuluhan tentang Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Balikpapan?	42%	58%
20.	Adakah kendala dalam menerapkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Balikpapan itu pada pondok pesantren ini?	42%	58%

2. Deskripsi Data Hasil Angket untuk MUI Kota Balikpapan

Untuk mengungkap partisipasi Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan terhadap Perda No. 10 Tahun 2004 tentang Kebersihan Lingkungan Kota Balikpapan digunakan angket yang berisi 10 pertanyaan. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap Majelis Ulama Indonesia kota Balikpapan disajikan pada tabel 25 berikut:

Tabel 25. Hasil Penelitian terhadap MUI Balikpapan

No.	Pertanyaan	Jawaban MUI
1.	Apakah Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan (selanjutnya disebut MUI Kota Balikpapan) memiliki visi dan misi tentang kebersihan lingkungan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah kota Balikpapan?	Tidak, Belum ada pembahasan secara khusus tentang visi dan misi yang dimaksud
2.	Apakah MUI Kota Balikpapan telah mendapatkan Salinan tentang Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Balikpapan?	Tidak
3.	Adakah kendala dalam menerapkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Balikpapan itu khususnya untuk MUI Kota Balikpapan ini?	
4.	Apakah MUI Kota Balikpapan telah melakukan sosialisasi terhadap Perda tersebut kepada semua khatib-khatib masjid untuk menggalakkan kebersihan lingkungan	Tidak, belum pernah diminta untuk melakukan sosialisasi
5.	Apakah MUI Kota Balikpapan telah melakukan sosialisasi berupa penyuluhan-penyuluhan kepada tokoh-tokoh umat Islam dalam mensukseskan Perda No 10 Tahun 2004 ini?	Tidak, belum pernah dapat perda No. 10 tahun 2004
6.	Apakah ada semacam media informasi kepada tokoh dan umat Islam yang disediakan oleh MUI Kota Balikpapan terkait dengan Perda No 10 Tahun 2004 itu?	Ya, rapat koordinasi ormas-ormas Islam

No.	Pertanyaan	Jawaban MUI
7.	Apakah dalam menjalankan tugas dan fungsi, Sumber Daya Manusia (SDM) di MUI Kota Balikpapan menjadi kendala dalam sosialisasi Perda tersebut?	Tidak
8.	Apakah MUI Kota Balikpapan mempunyai gagasan menyeluruh mengenai kebersihan lingkungan, mulai dari kajian agama, sosial, budaya dan ekonomi?	Sudah, dalam bentuk
9.	Apakah dalam menjalankan tugas dan fungsi, keteladan dan contoh dari MUI Kota Balikpapan menjadi kendala dalam mewujudkan tujuan Perda ini?	Tidak
10.	Adakah pendapat atau saran lain berkaitan dengan pengelolaan sampah yang belum ditanyakan disini?	Sebaiknya Perda no.10 Tahun 2004 disosialisasikan secara intensif dengan melibatkan peran ulama dan tokoh agama dan ditetapkan team permanen

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Pembahasan Hasil Penelitian terhadap Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Majelis Ulama Indonesia tersebut, terlihat bahwa belum ada partisipasi Majelis Ulama Indonesia kota Balikpapan terhadap kebersihan lingkungan kota Balikpapan. Hal ini disebabkan tidak tersosialisasikan Perda No. 10 Tahun 2004 kota Balikpapan pada masyarakat pada umumnya, dan kepada Majelis Ulama Indonesia pada khususnya, dan

Majelis Ulama Indonesia kota Balikpapan juga tidak diminta untuk mensosialisasikan Perda No. 10 tersebut.

2. Pembahasan Hasil Penelitian terhadap Ormas Islam kota Balikpapan

Dari hasil penelitian tentang partisipasi Organisasi Masyarakat Islam terhadap pelaksanaan Perda no. 10 Tahun 2004 tentang kebersihan lingkungan kota Balikpapan, berikut pembahasan hasil penelitian tersebut.

Untuk pertanyaan nomor 1 tentang rutinitas kegiatan membersihkan lingkungan pondok. Dari jawaban responden yang semuanya adalah pondok pesantren, 100% menjawab “ya”, hal ini berarti bahwa seluruh masyarakat kota Balikpapan sudah sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan mengadakan gotong royong (kerja bakti) secara rutin.

Untuk pertanyaan nomor 2 tentang “adanya anggaran khusus untuk kegiatan kerja bakti”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 42% pondok pesantren yang menjadi responden menjawab “ya”, artinya mereka menyediakan anggaran untuk kegiatan kerja bakti membersihkan pondok secara rutin. Sedangkan 58% pondok pesantren yang menjadi responden menjawab “tidak”, artinya mereka tidak menyediakan anggaran khusus untuk kerja bakti membersihkan lingkungan pondok.

Untuk pertanyaan nomor 3 tentang “keterlibatan santri dalam kegiatan kerja bakti”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100% pondok pesantren yang menjadi responden menjawab “ya”, hal ini berarti semua santri terlibat dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan pondok pesantren.

Untuk pertanyaan nomor 4 tentang “keterlibatan pengurus pondok dalam kegiatan kerja bakti”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 83% pondok pesantren yang menjadi responden menjawab “ya”, hal ini berarti bahwa sebagian besar pengurus pondok ikut terlibat dalam kegiatan kerja bakti, dan sebagian kecil pondok mungkin menyerahkan kegiatan tersebut kepada santri saja yakni sebanyak 17% pondok pesantren.

Untuk pertanyaan nomor 5 tentang “area kegiatan kerja bakti”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 92% pondok pesantren yang menjadi responden menjawab “ya”, hal ini berarti sebagian besar pondok pesantren melakukan kegiatan kerja bakti di dalam dan di luar lingkungan pondok.

Untuk pertanyaan nomor 6 tentang “penggerak kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menggerakkan kegiatan tersebut adalah pengurus pondok, ustadz dan ustadzah, dan pimpinan pondok.

Untuk pertanyaan nomor 7 tentang “adanya tempat pembuangan sampah pada masing-masing kelas”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 75% pondok pesantren yang menjadi responden menjawab “ya”, hal ini berarti 75% pondok pesantren sudah menyediakan tempat sampah di masing-masing kelas. Sedangkan 25% pondok belum menyediakannya.

Untuk pertanyaan nomor 8 tentang “adanya media informasi tentang kebersihan dilingkungan pondok”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 83% pondok pesantren yang menjadi responden menjawab “ya”, hal ini berarti

sebagian besar pondok sudah menyediakan media informasi untuk menambah pengetahuan warga sekitar tentang kebersihan lingkungan.

Untuk pertanyaan nomor 9 tentang “adanya petugas kebersihan yang rajin mengangkut dan membuang sampah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 67% pondok pesantren yang menjadi responden menjawab “ya”, hal ini berarti sebagian besar pondok ada petugas kebersihan yang mengangkut dan membuang sampah. Terdapat 33% pondok yang tidak ada petugas kebersihan, dimungkinkan pondok tersebut menyerahkan permasalahan kebersihan kepada santri-santrinya.

Untuk pertanyaan nomor 10 tentang “adanya sarana pembuangan sampah sementara di pondok”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 92% pondok pesantren yang menjadi responden menjawab “ya”, hal ini berarti hampir sebagian besar pondok pesantren memiliki sarana pembuangan sampah sementara.

Untuk pertanyaan nomor 11 tentang “sarana pemindahan sampah”. Hasil penelitian menunjukkan 50% pondok pesantren yang menjadi responden menjawab “ya”, dan 50% pondok pesantren yang lain belum memiliki sarana pemindahan sampah.

Untuk pertanyaan nomor 12 tentang “kepemilikan gerobak sampah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 92% pondok pesantren yang menjadi responden menjawab “ya”, hal ini berarti sebagian besar pondok pesantren memiliki gerobak sampah.

Untuk pertanyaan nomor 13 tentang “perencanaan pengelolaan kebersihan lingkungan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 67% pondok pesantren yang menjadi responden menjawab “ya”, hal ini berarti 67% pondok pesantren yang menjadi responden memiliki pengelolaan kebersihan secara terencana.

Untuk pertanyaan nomor 14 tentang “adanya pihak ketiga dalam pengelolaan kebersihan di pondok”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 92% pondok pesantren yang menjadi responden menjawab “tidak”, hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan kebersihan lingkungan pondok tidak perlu melibatkan pihak ketiga atau pihak lain.

Untuk pertanyaan nomor 15 tentang “keterlibatan santri dalam kegiatan kerja bakti”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100% pondok pesantren yang menjadi responden menjawab “ya”, hal ini berarti semua santri terlibat dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan pondok pesantren.

Untuk pertanyaan nomor 16 tentang “adanya pepohonan di lingkungan pondok”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 67% pondok pesantren yang menjadi responden menjawab “ya”, hal ini berarti sebagian pondok masih memiliki pepohonan untuk menjaga kesegaran udara di pondok.

Untuk pertanyaan nomor 17 tentang “adanya anggaran untuk pengelolaan Lingkungan Hidup”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 75% pondok pesantren yang menjadi responden menjawab “ya”, hal ini berarti bahwa sebagian besar pondok memiliki anggaran untuk pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk pertanyaan nomor 18 tentang “adanya visi dan misi dari ”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 58% pondok pesantren yang memiliki visi dan misi tentang kebersihan lingkungan.

Untuk pertanyaan nomor 19 tentang “adanya penyuluhan tentang perda no. 10 ”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 58% pondok pesantren yang menjadi responden menjawab “tidak”, hal ini berarti baru sebagian pondok yang telah mendapat penyuluhan tentang perda No. 10 Tahun 2004 , dan sebagian pondok yang lain belum mendapat penyuluhan tentang kebersihan.

Untuk pertanyaan nomor 20 tentang “adanya kendala dalam penerapan perda No. 10 Tahun 2004 tentang pengelolaan sampah””. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 58% pondok pesantren yang menjadi responden menjawab “tidak”, hal ini berarti bahwa ada beberapa pondok yang masih perlu pembinaan dalam penerpan Perda no. 10 Tahun 2004 tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan hasil penelitian pada Bab IV tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pondok pesantren sudah menerapkan Perda 10 nomor Tahun 2004 tentang kebersihan dengan kerja bakti secara rutin untuk membersihkan lingkungan pondok. Hal ini terlihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 100% responden (pondok pesantren) sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan mengadakan gotong royong (kerja bakti) secara rutin. Pondok Pesantren tidak melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan kebersihan lingkungan, hal ini terlihat dari hasil penelitian bahwa 92% responden tidak melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan kebersihan lingkungan pondok. Pondok pesantren sudah menyediakan pembuangan sampah sementara, Kesadaran akan pengelolaan lingkungan hidup sudah tinggi dengan mengalokasikan anggaran khusus, hal ini terlihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 75% pondok pesantren yang menjadi responden memiliki anggaran untuk pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Belum adanya peran Majelis Ulama Indonesia kota Balikpapan dalam mensosialisasikan Perda nomor 10 Tahun 2004 tentang kebersihan kota, karena

memang belum diminta untuk mensosialisasikan Perda nomor 10 tersebut oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

B. SARAN

1. Kepada Pemerintah Kota Balikpapan untuk lebih mengintensifkan tersosialisasinya Perda nomor 10 Tahun 2004 kepada seluruh masyarakat Kota Balikpapan demi terciptanya Kota Balikpapan yang Bersih dan Sehat..
2. Kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan untuk lebih aktif dalam mensosialisasikan Perda nomor 10 Tahun 2004, mengingat Ulama adalah seseorang yang masih didengar nasehat-nasehatnya oleh masyarakat.
3. Kepada Organisasi-organisasi masyarakat Islam, untuk lebih aktif dalam melaksanakan Perda nomor 10 Tahun 2004 agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat Kota Balikpapan.
4. Untuk pondok-pondok pesantren, untuk megerahkan semua santrinya untuk secara rutin mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan pondok dengan mengalokasikan anggaran khusus supaya siswa semangat melaksanakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Shaleh-Muhbib Abdul Wahab. 2004. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta : Prenada Media
- Abu Bakar, Usman . 2008, *Kumpulan Materi Analisis Kebijakan Pendidikan, Balikpapan, Materi Perkuliahan Program Pascasarjana Magister Studi Islam* Yogyakarta
- Aden Wijan SZ. Dkk., 2007, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta, Cet.Pertama Safiria Insania Press
- Agus Salim MS., , 2006, *Teori dan Paradigma (Penelitian Sosisal)*, Yogyakarta Cet.Pertama Edisi kedua Pt.Tiara Wacana
- Anies. 2006, *Managemen Berbasis Lingkungan*, Jakarta, PT. Gramedia
- APKSA (Aliansi Pemantau Kebijakan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur), 2001, *Menguak Tabir Kelola Alam (Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi)*,
- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2008, *Evaluasi Program Pendidikan (Pedoman Teoretis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan)*, Edisi kedua Cet.Pertama, Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Kesepuluh. Jakarta : Rineka Cipta
- Ary Ginanjar Agustian, 2006, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual*, Jakarta, Cet.Ketigapuluh satu, Arga
- Asrorun Ni'am Sholeh, 2006, *Reorientasi Pendidikan Islam (Mengurai Relevansi Konsep Al-Qazali dalam Konteks Kekinian)*, Jakarta, Cet.ketiga, elSas
- Bapedalda Kota Balikpapan, 2009, *Pedoman Umum Pelaksanaan Bersih dan Hijau*, Balikpapan
- Bashori Muchsin. Dan Abdul Wahid. 2009, *Pendidikan Islam Kontemporer*, Bandung, Cet. Pertama Refika Editama

Dewantoro, M Hajar. 2008, *Pengembangan Profesi Keguruan*, Balikpapan, Materi Perkuliahan Program Pascasarjana Magister Studi Islam Yogyakarta

DKPP Kota Balikpapan, 2005. *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Persampahan di Kota Balikpapan*,

DKPP Kota Balikpapan, 2006. *Petunjuk Sederhana Pengelolaan Persampahan di Kota Balikpapan*

DKPP Kota Balikpapan, 2009, *Panduan Pengelolaan Kebersihan dan Taman*, Balikpapan

DKPP, PKK dan Yayasan PEDULI Kota Balikpapan, 2006, *Buku Petunjuk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Menjadi Kompos melalui Program 4R*, Balikpapan,

Hakim Muda Harahap, 2007, *Rahasia Al-Quran (Menguak Alam Semesta, manusia, Malaikat dan Keruntuahan Alam)* Jakarta, Cet. Pertama Darul Hikmah

Harold G.Shane, 2002. *Arti Pendidikan Bagi Masa Depan* , Jakarta, Cet. Ketiga Pt. Raja Grafindo Persada.

Haslinda Yasti Agustin. *Masalah Sampah di Indonesia dan Solusinya*. Diakses dari <http://gbioscience05.wordpress.com/2008/04/22/masalah-sampah-di-indonesia-dan-solusinya/> tanggal 21 September 2009.

Imam Al-Mundziri, 2001, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*. Jakarta, Pustaka Amani
Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, 2007, *Teologi Lingkungan (Teologi Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Islam)* , Jakarta, Kerjasama Kementerian Negara LH dan Lembaga LH PP Muhammadiyah.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, 2006, *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup* Nomor : 14 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura, Jakarta

Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, 2008, *Statistik Persampahan Indonesia Tahun 2008*, Jakarta

Kementrian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta :

- Kuntowijoyo, 2006. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya
- Millah, Jurnal Studi Agama. Vol. VI. No. 2, 2007: *Ekologi Perspektif Agama*. 2007. Yogyakarta : MSI Program Pasca Sarjana UII
- Mu'allim, Amir. 2007, Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam Menuju Balikpapan Madinatul Iman, Balikpapan, Materi Studium Generale Pendidikan Islam Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
- , 2008, *Filsafat Ilmu, Materi Perkuliahan Balikpapan*, Program Pascasarjana Magister Studi Islam Yogyakarta
- Muhammad Jawwad Ridla, 2002, *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam (Perspektif Sosiologi = Filosofis)*, Yogyakarta, Pt. Tiara Wacana
- Muhammad Nizar Daqr. 2002, *Hidup Sehat dan Bersih ala Nabi*, Cet. Ketiga, Jakarta: Himmah Pustaka
- Muis Sadiman, 2003. *Pendidikan Partisipatif*. Yogyakarta : Safiria Insania Press.
- Nitikesari, Putu Ening. 2005. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Sampah Secara Mandiri di Kota Denpasar. Tesis Magister Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.
- Pemerintah Kota Balikpapan, 2004, Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2004, tentang Pengelolaan Sampah Kota Balikpapan, Balikpapan, Bagian Hukum
- PPLH UNUD. 2005. *Laporan Pengkajian Penyusunan Pedoman Dan Kriteria Adipura Regional Provinsi Bali*. Laporan Penelitian Kerjasama PPLH UNUD dengan PUSREG Bali-Nusra. Denpasar
- PPLH UNUD. 2007. *Kajian Sosial Kemasyarakatan Model Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Pemukiman Perkotaan Di Provinsi Bali*. Laporan Penelitian Kerjasama PPLH UNUD dengan PUSREG Bali-Nusra. Denpasar
- S.Yunanto. 2005, *Pintu-Pintu Menuju Kebangkitan Islam dan Indonesia*, Jakarta, Forpis
- Sa'id bin 'Ali bin Wahf Al Qahthani. 2004, *Thaharah Nabi, Tuntunan bersuci lengkap*. Yogyakarta : Media Hidayah

- Sanaky, Hujair AH.. 2003. *Paradigma Pendidikan Islam, Membangun Masyarakat Madani Indonesia*. Yogyakarta : Safiria Insania Press
- Suyata. 2008, *Pendidikan Humanis-Religius : Membangun Bangsa Bersatu, Berkarakter dan Cerdas*, Balikpapan, Materi Perkuliahan Program Pascasarjana Magister Studi Islam Yogyakarta
- Syahrin Harahap. 1999, *Islam, Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, Yogyakarta, Cet. Pertama Pt.Tiara Wacana
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*
- W.F. Wertheim. 1999, *Masyarakat Indonesia dlam Transisisi*, Yogyakarta, Cet. Pertama PT.Tiara Wacana
- Yunahar Ilyas,. 2007, *Tipologi Manusia Nenurut Al-Quran*, Yogyakarta Cet. Pertama Labda Press.
- Zainuddin Fananie dan M.Thoyibi, 1999, *Studi Islam Asia Tenggara*, Surakarta, Cet. Kedua Muhamadiyah University Press.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ANGKET PENELITIAN
PENDIDIKAN PARTISIPATIF MASYARAKAT
TERHADAP KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KOTA BALIKPAPAN
(Studi Kasus Dukungan Lembaga Pendidikan Islam dan Ormas Islam
terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004
tentang Pengelolaan Persampahan)

ANGKET UNTUK
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

PENGELOLAAN SAMPAH DAN LINGKUNGAN
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA MADINATUL IMAN

DATA UMUM RESPONDEN

Nama Pondok Pesantren :

Alamat :

Jawablah dengan memberi tanda (X) pada pilihan anda dan beri keterangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

1. Apakah kegiatan membersihkan lingkungan pondok (selanjutnya disebut kerja bakti saja), dilakukan secara rutin ?	1. Ya 2. Tidak Jika tidak, kapan saja kerja bakti dilakukan :
2. Adakah anggaran khusus Pondok Pesantren untuk kegiatan kerja bakti?	1. Ya 2. Tidak Tidak jika tidak, bagaimana kerja bakti dilakukan:.....

3. Apakah kegiatan kerjabakti biasanya diikuti oleh semua santri yang ada di pondok pesantren?	1. Ya 2. Tidak Berapa banyak prosentasinya :.....
4. Apakah kegiatan kerjabakti biasanya juga melibatkan pengurus pondok pesantren?	1. Ya 2. Tidak Jika tidak, mengapa:
5. Apakah kegiatan kerjabakti juga dilakukan disekitar dan diluar area pondok pesantren?	1. Ya 2. Tidak Jika tidak, mengapa :.....
6. Siapakah yang biasanya menggerakkan kerja bakti di pondok pesantren? (Jawaban bisa lebih dari satu, mohon disebutkan)	Sebutkan:
7. Apakah pondok pesantren ini memiliki tempat pembuangan sampah pada masing-masing kelas/asrama?	1. Ya 2. Tidak
8. Apakah di lingkungan pondok pesantren, ada semacam media informasi (majalah dinding atau yang lain) untuk menambah pengetahuan warga pondok tentang kebersihan lingkungan ?	1. Ya , Jika ya dalam bentuk apa, sebutkan : ... 2. Tidak
9. Apakah di lingkungan pondok pesantren ada petugas kebersihan yang rutin mengangkut dan membuang sampah ?	1. Ya Jika ya, berapa kali seminggu petugas tersebut datang: 2. Tidak
10. Apakah pondok pesantren ini memiliki sarana pembuangan sampah sementara ?	1. Ya 2. Tidak , mengapa?
11. Apakah di lingkungan pondok pesantren ini memiliki sarana tempat pemindahan sampah? (seperti: TPS, Transfer Depo, Transfer Station)	1. Ya 2. Tidak, Jika tidak, kemana dibuang:

12. Apakah di lingkungan Pondok pesantren ini memiliki gerobak sampah ?	1. Ya 2. Tidak, mengapa :
13. Apakah di lingkungan pondok pesantren ini mempunyai perencanaan menyeluruh mengenai pengelolaan kebersihan lingkungan?	1. Ya 2. Tidak
14. Apakah dalam pengelolaan kebersihan/sampah di pondok pesantren ini melibatkan pihak ketiga/pihak luar?	1. Ya, Sebutkan : 2. Tidak, mengapa?
15. Apakah pondok pesantren ini sudah pernah mendapatkan penyuluhan mengenai kebersihan/persampahan ?	1. Ya, Sebutkan :..... 2. Tidak
16. Apakah di lingkungan pondok pesantren ini terdapat banyak pepohonan atau tanaman?	1. Ya, sebutkan: 2. Tidak
17. Apakah pondok pesantren ini memiliki penganggaran untuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Ya 2. Tidak Jika tidak, mengapa :
18. Apakah pondok pesantren ini memiliki visi dan misi tentang kebersihan lingkungan yang sesuai dengan visi misi pembangunan daerah kota Balikpapan?	1. Ya Jika memiliki, mohon melampirkan penjelasan visi dan misi tersebut 2. Tidak
19. Apakah pondok pesantren ini telah mendapatkan penyuluhan tentang Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Balikpapan?	1. Ya 2. Tidak
20. Adakah kendala dalam menerapkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Balikpapan itu pada pondok pesantren ini?	1. Ya, sebutkan 2. Tidak

ANGKET PENELITIAN
PENDIDIKAN PARTISIPATIF MASYARAKAT
TERHADAP KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KOTA BALIKPAPAN
(Studi kasus Dukungan Lembaga Pendidikan Islam dan Ormas Islam
terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004
tentang Pengelolaan Persampahan)

ANGKET UNTUK
MAJELIS ULAMA INDONESIA

PENGELOLAAN SAMPAH DAN LINGKUNGAN
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA MADINATUL IMAN

DATA UMUM RESPONDEN

Nama Organisasi : MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA
BALIKPAPAN
Alamat :

Jawablah dengan memberi tanda (X) pada pilihan 1 atau 2 dan beri keterangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

1. Apakah Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan (selanjutnya disebut MUI Kota Balikpapan) memiliki visi dan misi tentang kebersihan lingkungan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah kota Balikpapan?	1. Ya, mohon melampirkan visi dan misi tersebut 2. Tidak Jika tidak, mengapa
2. Apakah MUI Kota Balikpapan telah mendapatkan Salinan tentang Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Balikpapan?	1. Ya 2. Tidak

3. Adakah kendala dalam menerapkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Balikpapan itu khususnya untuk MUI Kota Balikpapan ini?	Sebutkan:
4. Apakah MUI Kota Balikpapan telah melakukan sosialisasi terhadap Perda tersebut kepada semua khatib-khatib masjid untuk menggalakkan kebersihan lingkungan	1. Ya, dalam bentuk apa? 2. Tidak, mengapa?
5. Apakah MUI Kota Balikpapan telah melakukan sosialisasi berupa penyuluhan-penyuluhan kepada tokoh-tokoh umat Islam dalam mensukseskan Perda No 10 Tahun 2004 ini?	1. Ya, dalam bentuk apa? 2. Tidak, mengapa?
6. Apakah ada semacam media informasi kepada tokoh dan umat Islam yang disediakan oleh MUI Kota Balikpapan terkait dengan Perda No 10 Tahun 2004 itu?	1. Ya, dalam bentuk apa? 2. Tidak, mengapa?
7. Apakah dalam menjalankan tugas dan fungsi, Sumber Daya Manusia (SDM) di MUI Kota Balikpapan menjadi kendala dalam sosialisasi Perda tersebut?	1. Ya, mengapa? 2. Tidak
8. Apakah MUI Kota Balikpapan mempunyai gagasan menyeluruh mengenai kebersihan lingkungan, mulai dari kajian agama, sosial, budaya dan ekonomi?	1. Sudah; dalam bentuk brosur, leaflet, buku atau materi-materi khutbah, atau sebutkan.. 2. Belum, mengapa?
9. Apakah dalam menjalankan tugas dan fungsi, keteladanan dan contoh dari MUI Kota Balikpapan menjadi	1. Ya 2. Tidak

kendala dalam mewujudkan tujuan Perda ini?	
10. Adakah pendapat atau saran lain berkaitan dengan pengelolaan sampah yang belum ditanyakan disini?	



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA